



04

**Analisis dan
Pembahasan Manajemen**
Management Discussion and Analysis



Achievement

NPF

TARGET

Integrator

Innovation

Innovation

data

Tinjauan Umum

General Overview

Analisa Ekonomi Global

Pertumbuhan ekonomi global bergerak secara moderat sejalan dengan pemulihan pada aktivitas perdagangan dan manufaktur. Dalam Global Economy Prospect yang terbit pada bulan Januari 2019, Bank Dunia menyatakan ketegangan perdagangan di negara maju tetap meningkat meskipun negosiasi tengah berjalan sepanjang tahun 2018. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan melemah, dimana perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2018 dikoreksi dari 3,1% menjadi 3,0% dan akan terus menurun menjadi 2,9% pada tahun 2019 dan 2,8 pada tahun 2020 – 2021.

Eksportir komoditas menghadapi tantangan, salah satunya dari penguatan Dolar AS terhadap banyak mata uang dunia pada tahun 2018. Selain itu terjadi fluktuasi harga energi dengan penurunan yang tajam pada akhir tahun 2018 terutama karena melimpahnya pasokan. Komoditas lain juga mengalami pelemahan, termasuk logam.

Global Economic Analysis

The global economic growth is moving moderately in line with the recovery in trading and manufacturing activities. In the Global Economy Prospects published in January 2019, the World Bank stated that trade tensions in developed countries continued to increase even though negotiations were underway throughout 2018. Global economic growth is expected to weaken, where the estimated growth in 2018 is revised from 3.1% to 3.0% to further decline to 2.9% in 2019 and 2.8% in 2020 – 2021.

Commodity exporters are facing challenges, among which is the strengthening of the US Dollar against many world currencies in 2018. In addition, there have been fluctuations in energy prices with a sharp decline at the end of 2018 mainly due to abundant supply. Other commodities also experience weaknesses, including metal.

Kekuatan ekonomi dunia juga menghadapi tren melemahnya pertumbuhan ekonomi, kecuali AS pada tahun 2018 diperkirakan mencatat pertumbuhan 2,9% dibanding 2,2% pada tahun 2017. Negara-negara Eropa diperkirakan mengalami penurunan dari 2.4% pada tahun 2017 menjadi 1,9% pada tahun 2018. Dua kekuatan Asia juga berada di posisi yang sama dimana Jepang diperkirakan hanya akan tumbuh 0,8% pada tahun 2018 padahal pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 masing 1,9%. Hal serupa terjadi pada Tiongkok dimana meskipun masih di atas rata-rata namun tahun 2018 diperkirakan pertumbuhan ekonominya sebesar 6,5%, dibanding tahun 2017 sebesar 6,9%.

The strength of the world economy is also facing a trend of weakening economic growth, except the US in 2018 is expected to record 2.9% growth compared to 2.2% in 2017. European countries are expected to experience a decline from 2.4% in 2017 to 1.9% in 2018. Two Asian powers are also in the same position where Japan is expected to only grow 0.8% in 2018 even though the economic growth in 2017 was 1.9%. The same thing happened in China, even though the figure is still above the average, but in 2018 it is estimated that economic growth is 6.5%, compared to 2017 at 6.9%.

Analisis Perekonomian Nasional.

Secara nasional Indonesia berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sesuai dengan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 5,17% pada akhir tahun 2018, atau meningkat dibandingkan 5,07% pada tahun 2017. Demikian pula tingkat inflasi terus melanjutkan tren penurunan dengan posisi akhir tahun sebesar 3,13%, dibandingkan tahun 2017 sebesar 3,61%. Namun demikian Bank Indonesia menaikkan BI 7-day Reverse Repo Rate sebesar 6,00%, dengan suku bunga Deposit Facility 5,25% serta Lending Facility 6,75%, dengan tujuan untuk menjaga stabilitas makro ekonomi dan memperkuat ketahanan eksternal.

National Economic Analysis.

Nationally, Indonesia has succeeded in increasing economic growth, in accordance with the publication of the Central Bureau of Statistics (BPS) reaching 5.17% by the end of 2018, an increase compared to 5.07% in 2017. Similarly the inflation rate continues a downward trend with year-end position of 3.13%, compared to 2017 at 3.61%. However, Bank Indonesia raised the 7-day Reverse Repo Rate to 6.00%, with a Deposit Facility rate of 5.25% and a Lending Facility of 6.75%, with the aim of maintaining macroeconomic stability and strengthening external resilience.

Namun demikian beberapa sektor industri masih mengalami tekanan, salah satunya properti akibat belum pulihnya permintaan masyarakat. Berbeda dengan perekonomian global yang cenderung tertekan, Bank Dunia memperkirakan perekonomian Indonesia masih akan tumbuh meskipun dalam rentang yang tipis hingga tahun 2021. Namun demikian, para pelaku usaha perlu mewaspadaikan tren pelemahan global dapat berdampak pada kondisi bisnis di pasar domestik.

However, some industrial sectors are still experiencing pressure, one of which is property due to the lack of recovery in public demand. In contrast to the global economy which tends to be depressed, the World Bank estimates that the Indonesian economy will still grow even though it is in a thin range until 2021. However, business people need to be aware of the global weakening trend that can impact business conditions in the domestic market.

Tinjauan Industri

Peningkatan suku bunga acuan memberi dampak perlambatan pada industri multifinance pada akhir tahun 2018. Ketergantungan pendanaan kepada bank yang tinggi mendorong perlambatan, mengingat bank mulai mengurangi porsi pinjaman kepada multifinance. Sehingga hanya beberapa perusahaan multifinance yang didukung oleh kekuatan kelompok usaha, yang relatif tidak terganggu terhadap dinamika pasar.

Perlunya stimulus ekonomi ini dirasakan oleh industri multifinance, dimana dengan peningkatan BI 7-day Reverse Repo Rate menjadi 6,00% akan mendorong kenaikan suku bunga komersial. Dengan ketergantungan tinggi pada perbankan, berdampak pada terjadinya tren penurunan pertumbuhan pembiayaan pada akhir tahun 2018. Hanya perusahaan pembiayaan yang mendapat dukungan dari kelompok usaha atau bank yang terafiliasi yang masih memiliki harapan tumbuh yang besar.

Industry Overview

The increase in benchmark interest rate caused a slowdown in the multifinance industry at the end of 2018. The high dependence on funding from banks encouraged a slowdown, considering banks began to reduce the loan portion to multifinance companies. So that only a few finance companies are supported by their business group strength, which is relatively undisturbed by market dynamics.

The need for this economic stimulus is felt by the multi-industry, where an increase in the 7-day Reverse Repo Rate to 6.00% will encourage a rise in commercial interest rates. With high dependence on banks, it has an impact on the downward trend in financing growth by the end of 2018. Only finance companies that get support from affiliated business groups or banks still have high growth expectations.

Tinjauan Operasi dan Keuangan

Review of Operations and Finances

Tinjauan Operasi

Dinamika yang terjadi sepanjang tahun 2017 dan berlanjut pada tahun 2018 membuat Perseroan secara operasional belum dapat mengembalikan kinerja operasional yang negatif. Perseroan mencatat pendapatan negatif pada tahun 2018 sebesar negatif Rp 62,788 miliar dengan penurunan sebesar -67% dari tercatatnya pendapatan negatif Rp 37,527 miliar pada tahun 2017.

Operational Review

The dynamics that occurred throughout 2017 and continued in 2018 have made the Company operationally unable to restore negative operational performance. The Company recorded negative income in 2018 amounting to negative Rp 62,788 billion with an decrease of -67% from recorded negative income of Rp 37,527 billion in 2017.

Dalam miliar Rupiah / In billion Rupiah

Rincian / Details	2017	2018	Perubahan / Change (%)
Pendapatan / Income	(37,527)	(62,788)	-67
Beban / Expenses	(249,217)	(116,432)	53
Rugi Sebelum Pajak / Loss Before Tax	(286,744)	(179,220)	37
Manfaat Pajak / Tax Benefits	71,148	13,146	81
Rugi Bersih Tahun Berjalan / Current Year Net Loss	(215,596)	(166,074)	23
Penghasilan Komprehensif Lain / Other Comprehensive Income	(436)	981	325
Jumlah Rugi Komprehensif Tahun Berjalan / Total Current Year Comprehensive Loss	(216,032)	(165,093)	24

Pendapatan dari sewa pembiayaan tercatat sebesar Rp 22,037 miliar pada tahun 2018, turun sebesar 32% dari Rp 32,422 miliar pada tahun 2017. Sedangkan pendapatan Ijarah tercatat sebesar negatif Rp 103,578 miliar pada tahun 2018 atau naik turun sebesar -21% dibanding negatif Rp 85,699 miliar pada tahun 2017. Selain itu Perseroan membukukan pendapatan modal kerja pada tahun 2018 sebesar Rp 1,839 miliar.

Income from finance leases was recorded at Rp 22.037 billion in 2018, a decrease of 32% from Rp. 32.422 billion in 2017. Meanwhile, Ijarah's income was recorded negative Rp 103.578 billion in 2018, down by -21% compared to negative Rp 85.699 billion in 2017. In addition, the Company obtained working capital income in 2018 amounting to Rp 1.839 billion.

Hal ini membuat pendapatan Perseroan mencapai negatif Rp 62,788 miliar pada tahun 2018 atau menurun sebesar -67% dari sebelumnya negatif Rp 37,527 miliar. Penurunan pendapatan Perseroan ditahun 2018 disebabkan karena masih belum pulihnya *Non Performing Financing* sehingga masih banyak debitur yang tidak melakukan pembayaran angsuran. Biaya umum dan administratif meningkat karena Perseroan banyak mengeluarkan biaya untuk aksi korporasi dan penyelesaian *Non Performing Financing* melalui jalur hukum. Beban Perseroan mengalami penurunan sebesar 53%, dari sebelumnya pada tahun 2017 sebesar Rp 249,217 miliar menjadi Rp 116,432 miliar pada tahun 2018.

This makes the Company's revenue negative Rp 62.788 billion in 2018, an decrease of -67% from the previous year of negative Rp 37.527 billion. The decrease in Company income in 2018 was due to non-recovery of *Non Performing Financing* so that there are still many debtors who did not make installment payments. General and administrative costs increased because the Company incurred huge costs on corporate actions and settlement of *Non Performing Financing* through the legal channels. Company expenses decreased by 53%, from the previous year of Rp 249.217 billion to Rp 116.432 billion in 2018.

Penurunan biaya yang terjadi turut menurunkan kerugian komprehensif pada tahun 2018 sebesar 24%. Pada tahun 2018 rugi komprehensif tercatat sebesar Rp 165,093 miliar dibandingkan Rp 216,032 miliar pada tahun 2017.

The decrease in costs incurred helped decrease comprehensive loss in 2018 by 24%. In 2018 comprehensive loss was recorded at Rp 165.093 billion compared to Rp 216.032 billion in 2017.

Tinjauan Keuangan

1. Aset, Liabilitas dan Ekuitas

Pada tahun buku 2018 Perseroan mencatat penurunan total aset sebesar 10% dari sebelumnya Rp 2,109 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp 1,903 triliun. Penurunan juga terjadi pada total liabilitas sebesar 24% dari sebelumnya Rp 1,981 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp 1,510 triliun pada tahun 2018. Sementara ekuitas tercatat mengalami peningkatan sebesar 208% sebelumnya Rp 127,808 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp 393,341 miliar pada tahun 2018.

Financial Review

1. Assets, Liabilities and Equity

In financial year 2018, the Company recorded a decrease in total assets of 10% from Rp 2,109 trillion in 2017 to Rp 1,903 trillion. The decline also occurred in total liabilities by 24% from Rp 1,981 trillion in 2017 to Rp 1,510 trillion in 2018. While equity recorded an increase of 208% from Rp 127.808 billion in 2017 to Rp 393,341 billion in 2018.

Dalam miliar Rupiah / In billion Rupiah

Rincian / Details	2017	2018	Perubahan / Change [%]
Aset Lancar / Current Assets	1,069,592	871,979	-18
Aset Tidak Lancar / Non-Current Assets	1,039,025	1,031,178	-1
Total Aset / Total Assets	2,108,617	1,903,157	-10
Liabilitas Jangka Pendek / Short-Term Liabilities	1,522,959	229,808	-85
Liabilitas Jangka Panjang / Long-Term Liabilities	457,849	1,280,008	180
Total Liabilitas / Total Liabilities	1,980,809	1,509,816	-24
Total Ekuitas / Total Equity	127,808	393,341	-208

Penurunan total aset merupakan kontribusi dari penurunan aset lancar sebesar 18% pada tahun 2018 menjadi Rp 871,979 miliar dari sebelumnya Rp 1,069 triliun pada tahun 2017. Penurunan aset lancar berasal dari penurunan nilai investasi atas sewa pembiayaan dari sebelumnya Rp 979,388 miliar atau sebesar 12% menjadi Rp 866,444 miliar pada tahun 2018. Sementara aset lancar yang mengalami peningkatan berada pada pos kas dan setara kas menjadi Rp 72,805 miliar dari sebelumnya Rp 31,518 miliar.

Sementara aset tidak lancar mengalami penurunan sebesar 1% yang berasal dari penurunan aset untuk IMBT sebesar 42% menjadi Rp 279,793 miliar pada tahun 2018, dibanding Rp 481,541 miliar pada tahun 2017. Pos lain yang turun adalah aset tetap sebesar 26% menjadi Rp 1,858 miliar dari sebelumnya Rp 2,512 miliar. Sementara aset tidak lancar yang mengalami peningkatan berada pada aset tidak lancar lainnya menjadi Rp 322,932 miliar dari sebelumnya Rp 282,718 miliar.

The decrease in total assets was contributed by a decrease in current assets of 18% in 2018 to Rp 871.979 billion from Rp 1,069 trillion in 2017. The decrease in current assets came from a decrease in the value of investment in finance leases from Rp 979,388 billion or 12% to Rp 866,444 billion in 2018. Other items that dropped assets for IMBT were 42% to Rp 279.793 billion from Rp 481,541 billion. While current assets experienced an increase in cash and cash equivalents to Rp 72,805 billion from Rp 31,518 billion.

While non-current assets decreased by 1% from a decrease in assets for IMBT by 42% to Rp 279.793 billion in 2018, compared to Rp 481,541 billion in 2017. Other items that declined were fixed assets by 26% to Rp 1,858 billion from the previous year of Rp 2,512 billion. While non-current assets that experienced an increase were other non-current assets to Rp 322.932 billion from the previous year of Rp 282,718 billion.

Total Liabilitas yang menurun merupakan bagian dari hasil restrukturisasi keuangan yang berjalan sepanjang tahun 2018, dengan penurunan liabilitas jangka pendek sebesar 85% pada tahun 2018 menjadi Rp 229,808 miliar dari sebelumnya Rp 1,523 triliun pada tahun 2017. Penurunan liabilitas jangka pendek berasal dari utang bank sebesar 85% menjadi Rp 130,298 miliar pada tahun 2018, dibanding Rp 896,062 miliar pada tahun 2017. Pos lain yang turun adalah pembayaran di muka untuk IMBT sebesar 14% menjadi Rp 80,179 miliar dari sebelumnya Rp 93,517 miliar, serta utang usaha sebesar 83% menjadi Rp 83,857 miliar dari sebelumnya Rp 479,194 miliar.

Sementara pos liabilitas jangka panjang mengalami peningkatan sebesar 180% pada tahun 2018 menjadi Rp 1,280,008 miliar dari sebelumnya Rp 457,849 miliar pada tahun 2017. Peningkatan berasal dari MTN sebesar Rp 328,674 miliar pada tahun 2018. Nilai liabilitas jangka panjang yang mengalami peningkatan berada pada kewajiban lain-lain menjadi Rp 129,093 miliar dari sebelumnya Rp 119,322 miliar.

Terkait dengan kewajiban Perseroan terhadap pos liabilitas jangka pendek dan jangka panjang mengikuti perjanjian homologasi.

Untuk posisi ekuitas, peningkatan terjadi akibat selesainya proses konversi utang menjadi saham serta right issue, sehingga modal disetor dan ditempatkan penuh meningkat sebesar 105% pada tahun 2018 menjadi Rp 841,801 miliar dari sebelumnya Rp 411,162 miliar pada tahun 2017. Sementara posisi defisit mengalami peningkatan sebesar 55% pada tahun 2018 menjadi Rp 469,262 miliar dari sebelumnya Rp 303,188 miliar pada tahun 2017. Hal ini membuat posisi ekuitas Perseroan pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp 393,341 miliar atau meningkat sebesar 208% dibandingkan Rp 127,808 miliar pada tahun 2017.

2. Arus Kas

Perseroan mencatat kenaikan kas dan setara kas bersih pada tahun 2018 dari sebelumnya Rp 31,518 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp 72.805 miliar.

Decreasing total liabilities are part of financial restructuring results that ran throughout 2018, with a decrease in short-term liabilities by 85% in 2018 to Rp 229.808 billion from Rp 1,523 trillion in 2017. The decrease in short-term liabilities came from bank loans amounting to 85% to Rp 130.298 billion in 2018, compared to Rp 896,062 billion in 2017. Other items that dropped were prepayments for IMBT of 14% to Rp 80,179 billion from Rp 93,517 billion, and business loans amounting to 83% to Rp 83.857 billion from the previous year of Rp 479,194 billion.

While long-term liabilities increased by 180% in 2018 to Rp. 1.280.008 billion from Rp. 457,849 billion in 2017. The increase came from MTN of 1.86% to Rp. 328,674 billion in 2018, compared to Rp. 334,892 billion in 2017. The value of long-term liabilities that experienced an increase was in other liabilities to Rp 129.093 billion from Rp 119,382 billion.

Regarding the Company's obligations towards short-term and long-term liabilities proceeding with the homologation agreement.

In terms of equity position, the increase occurred due to completion of the debt conversion process into shares and rights issue, so that fully paid-in and placed capital increased by 105% in 2018 to Rp 841,801 billion from Rp 411.162 billion in 2017. While the deficit position increased by 55% in 2018 to Rp 469.262 billion from Rp 303,188 billion in 2017. This makes the Company's equity position in 2018 be recorded at Rp 393.341 billion or an increase of 208% compared to Rp 127,808 billion in 2017.

Cash Flow

The Company recorded an increase in net cash and cash equivalents in 2018 from previously Rp 31.518 billion in 2017 to Rp 72.805 billion.

Dalam miliar Rupiah / In billion Rupiah

Rincian / Details	2017	2018
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi / Net cash obtained from operating activities	190,576	59,791
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi / Net cash used for investment activities	(24,603)	(1,592)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan / Net cash used for funding activities	(150,113)	(17,099)
Kas dan setara kas awal tahun / Cash and cash equivalents at the beginning of the year	15,695	31,518
Kas dan setara kas akhir tahun / End of year cash and cash equivalents	31,518	72,805

Porsi kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi turun dari Rp 190,857 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp 59,791 miliar pada tahun 2018. Kemudian tercatat kas bersih untuk aktivitas investasi naik dari negatif Rp 24,603 miliar menjadi negatif Rp 1,592 miliar. Serta kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan naik dari negatif Rp 150,113 miliar menjadi negatif Rp 17,099 miliar.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Perseroan telah memperoleh pengesahan Majelis Hakim terhadap Perjanjian Perdamaian yang disusun Perseroan dengan para kreditor. Perjanjian Perdamaian ini telah ditindaklanjuti dengan beberapa aksi korporasi untuk menyelesaikan kewajiban, yang diawali dengan konversi utang menjadi ekuitas uang diiringi dengan Penambahan Modal Tanpa HMETD. Kemudian berlanjut dengan disepakatinya skema restrukturisasi utang kepada beberapa kreditor, dan dilakukannya Penambahan Modal melalui HMETD. Perseroan berharap rampungnya beragam skema restrukturisasi ini membuat kemampuan membayar utang lebih baik dan dapat menjaga keberlanjutan kegiatan usaha.

KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Perseroan masih mencatat beberapa piutang pembiayaan yang perlu diselesaikan. Perseroan melakukan berbagai upaya untuk menghindari *Non Performing Financing* yang dapat mengganggu kelangsungan hidup Perseroan.

Saat ini Perseroan belum dapat memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan untuk rasio NPF dibawah 5%, tetapi Perseroan telah melakukan revisi rencana tindak lanjut perbaikan NPF dimana rasio sesuai ketentuan akan dicapai pada tahun 2020.

STRUKTUR MODAL

Perseroan melakukan dua aksi korporasi yang dapat meningkatkan kualitas struktur modal. Pertama, reverse stock split sebagai bagian dari Penambahan Modal Tanpa HMETD yang mereduksi jumlah saham beredar dengan rasio lima banding satu, dari 3,173,720,000 saham menjadi 634,744,500 saham. Kemudian Perseroan melaksanakan Penambahan Modal melalui HMETD dan penerbitan Waran Seri -1. Rincian perubahan jumlah saham beredar akibat kedua aksi korporasi ini dapat dilihat pada bagian Profil Perusahaan dengan sub bagian Sejarah Pencatatan Saham pada halaman 43.

IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Perseroan pada tahun 2018 tidak memiliki ikatan material untuk investasi barang modal, baik dengan pihak berelasi maupun dengan pihak ketiga.

INVESTASI BARANG MODAL TAHUN 2018

Perseroan pada tahun 2018 tidak melakukan investasi barang modal, baik dengan pihak berelasi maupun dengan pihak ketiga.

The net cash portion obtained from operating activities decreased from Rp 190,857 billion in 2017 to Rp 59,791 billion in 2018. Then recorded net cash for investment activities increased from Rp 24,603 billion to Rp 1,592 billion. Similarly net cash used for funding activities increased from Rp 150,113 billion to Rp 17,099 billion.

DEBT PAYMENT ABILITY

The Company has obtained ratification from the Panel of Judges of the Peace Agreement prepared by the Company with its creditors. This Peace Agreement has been followed up with several corporate actions to settle obligations, which began with the conversion of debt to equity accompanied by Capital Additions without Preemptive Rights. Then continued with the agreement on a debt restructuring scheme to several creditors, and the implementation of Capital Additions through Preemptive Rights. The company hopes that the completion of various restructuring schemes will improve the ability to pay debts and can maintain sustainability of business activities.

COLLECTIBILITY OF RECEIVABLES

The company still recorded several financing receivables that need to be settled. To avoid Non Performing Financing that may disrupt the Company's survival, various efforts to manage accounts receivable have been carried out

At present the Company has not been able to fulfill the provisions of the Financial Services Authority Regulation for an NPF ratio below 5%, but the Company has revised the follow-up plan for improving NPF where the ratio according to the provisions will be achieved in 2020.

CAPITAL STRUCTURE

The Company carries out two corporate actions that can improve capital structure quality. First, a reverse stock split as part of Capital Additions without Preemptive Rights which reduces the number of outstanding shares with a ratio of five to one, from 3,173,720,000 shares to 634,744,500 shares. Then the Company implements Capital Additions through Preemptive Rights and the issuance of Series 1 Warrants. Details of changes in the number of outstanding shares due to these two corporate actions can be seen in the Company Profile section with the Subdivision of History of Shares Registration on page 43.

MATERIAL COMMITMENTS FOR INVESTMENT OF CAPITAL GOODS

In 2018 the Company had no material ties to capital goods investments, both with related parties and with third parties.

INVESTMENT OF CAPITAL GOODS IN 2018

In 2018 the Company did not invest in capital goods, either with related parties or with third parties.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Tidak ada informasi dan fakta material yang dapat mempengaruhi aktivitas dan kinerja Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan pada 31 Desember 2018.

PROSPEK USAHA

Perseroan masih belum dapat menyalurkan pembiayaan baru, dan baru dapat melakukannya pada tahun 2019. Rampungnya proses restrukturisasi keuangan pada tahun 2018 memberi keyakinan bahwa Perseroan pada tahun 2019 akan memiliki kinerja yang lebih baik, baik dari sisi operasional maupun keuangan.

PERBANDINGAN ANTARA PROYEKSI 2018 DAN PENCAPAIANNYA

Perseroan pada tahun 2018 memfokuskan diri untuk dapat keluar dari skema PKPU dan melakukan restrukturisasi keuangan. Pengesahan Majelis Hakim terhadap Perjanjian Perdamaian telah diperoleh pada tanggal 10 April 2018 dan dilanjutkan dengan penyelesaian berbagai skema restrukturisasi keuangan.

TARGET 2019

Dengan selesainya kesepakatan skema restrukturisasi, mendorong rasa optimis Perseroan dalam melakukan berbagai aktivitas pengembangan bisnis di tahun 2019. Organisasi yang lebih solid dan efisien, akan siap menghadapi tantangan pasar dengan lebih fokus. Hasil terbaik atas Perjanjian Perdamaian memberi nafas baru dalam menghadapi persaingan usaha, dan akan memberi peluang Perseroan meraih kinerja yang positif. Harapan besar ini perlu diwujudkan sebagai upaya dan kerja keras Perseroan memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Pada tahun 2019 Perseroan memiliki misi untuk menyelesaikan tiga target utama yaitu :

1. Mempercepat penurunan nilai *Non Performing Financing* (NPF)
2. Meningkatkan berbagai sumber dana.
3. Percepatan pengembangan bisnis yang prudent

Ketiga target utama tersebut diiringi dengan penyusunan kebijakan dan strategi secara *Non Financial* dan *Financial* agar misi utama Perseroan dapat tercapai. Kebijakan dan strategi pengembangan bisnis yang diterapkan di tahun 2019 mengacu kepada *Business Development Principles* yaitu:

INFORMATION AND MATERIAL FACTS AFTER THE ACCOUNTANT'S REPORTING DATE

There is no material information and facts that can affect the activities and performance of the Company that occur after the date of the financial statements as at December 31, 2018.

BUSINESS PROSPECTS

The company still could not distribute new financing, and may only do so in 2019. The completion of the financial restructuring process in 2018 gives confidence that the Company in 2019 will have better performance, both in terms of operations and financing.

COMPARISON BETWEEN 2018 PROJECTION AND ITS ACHIEVEMENT

In 2018 the company focused on being able to get out of the PKPU scheme and conduct financial restructuring. The Panel of Judges ratification of the Peace Agreement was obtained on April 10, 2018 and continued with the completion of various financial restructuring scheme.

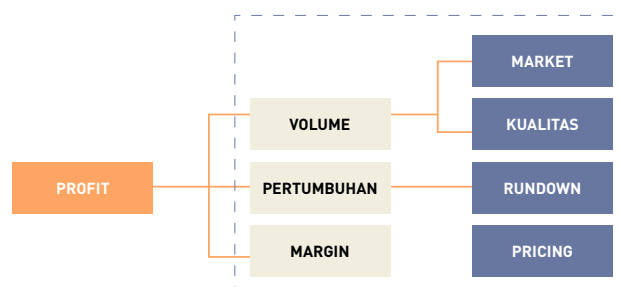
TARGET 2019

The completion of restructuring scheme agreement encourages optimism that the Company will carry out various business development activities in 2019. With a more solid and efficient organization the Company will be ready to face market challenges in a more focused manner. The best results of the Peace Agreement have provided a new breath in the face of business competition, and will provide opportunities for the Company to achieve positive performance. This great expectation needs to be realized as the Company's efforts and hard work to provide the best value for shareholders and other stakeholders.

In 2019 the Company has a mission to complete three main targets, namely:

1. Speed up reduction of *Non Performing Financing* (NPF)
2. Increase various funding sources
3. Accelerate development of prudent businesses

The three main targets are accompanied by the preparation of Financial and Non-Financial policies and strategies so that the main mission of the Company can be achieved. The business development policies and strategies implemented in 2019 refer to the *Business Development Principles*, namely:



Sementara pengembangan bisnis secara non-financial yang terfokus kepada :

1. Sumber Daya Manusia
2. Proses
3. Pengembangan Bisnis
4. Manajemen Risiko & Internal Control

Dalam upaya pemenuhan pasal 31 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (POJK 29/2014) yang menyebutkan bahwa : "Nilai piutang pembiayaan dengan kategori kualitas piutang pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan wajib paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari total piutang pembiayaan", maka Perseroan akan melakukan :

- Kolaborasi dengan Group Intraco Penta
- Pembentukan satuan tugas khusus penanganan NPF
- Restrukturisasi, reaktivasi / novasi dan penarikan unit.

Sesuai dengan usulan revisi rencana tindak lanjut penyelesaian NPF Perseroan yang disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan no 064/IBF/CPL-SK/XI/18 tanggal 15 November 2018 sampai dengan tahun 2020, nilai Non Performing Financing Perseroan dapat digambarkan sebagai berikut :

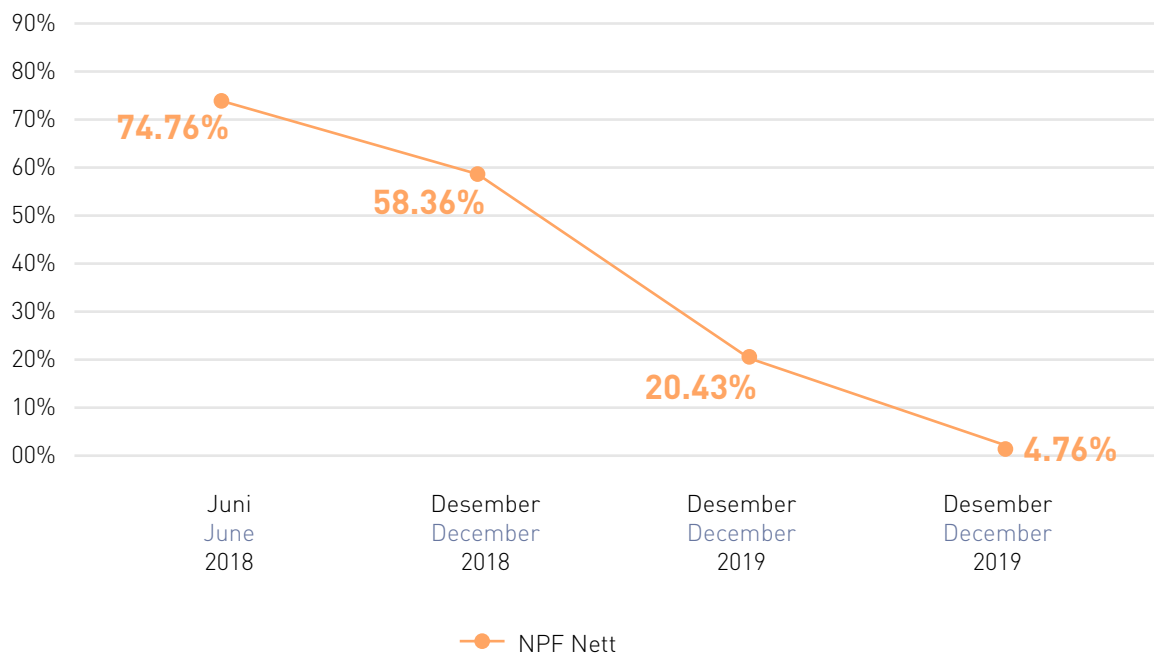
While non-financial business development focuses on:

1. Human Resources
2. Process
3. Business Development
4. Risk Management & Internal Control

In an effort to fulfill Article 31 paragraph (3) of Financial Services Authority Regulation number 29 / POJK.05 / 2014 concerning Business Operations of Finance Companies (POJK 29/2014) which states that: "Value of financing receivables with quality category of problematic financing receivables (Non Performing Financing) as referred to in paragraph (2) after deducting mandatory allowance for possible losses on financing receivables must at a maximum be 5% (five percent) of total financing receivables ", the Company will perform:

- Collaboration with Intraco Penta Group
- Establish a special task force for handling NPF
- Restructuring, reactivation and withdrawal of units.

In accordance with the proposed revision of the follow-up plan for the settlement of the Company's NPF submitted based on Financial Services Authority no 064 / IBF / CPL-SK / XI / 18 from 15 November 2018 to 2020, the value of the Company's Non Performing Financing can be described as follows:



Pencapaian rencana bisnis ini menggunakan asumsi sebagai berikut:

1. Perseroan akan membukukan pembiayaan baru sebesar Rp. 312.5 Milyar sepanjang tahun 2019
2. Perseroan akan mendapatkan sumber pendanaan baru dari bank pendana ataupun dari lembaga keuangan lainnya dan akan disalurkan melalui pembiayaan baru dengan tingkat suku bunga rata-rata 17 % p.a.
3. Selain dari pembiayaan baru, Perseroan merencanakan akan meningkatkan pendapatan dari reaktivasi aset yang diambil alih (AYDA) dan unit-unit yang terdapat dalam Account Receivable bermasalah.
4. Beban biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan termasuk biaya-biaya atas kerjasama yang dilakukan Perseroan dengan pihak ketiga dalam upaya percepatan perbaikan NPF seperti biaya reposes, perbaikan unit, legal action)

PEMASARAN DAN PENGEMBANGAN BISNIS

Melihat kondisi Perseroan dan prediksi ketersediaan dana yang dimiliki, maka ditahun 2019 pembukuan pembiayaan baru yang ditargetkan Perseroan sebesar Rp. 312,5 Milyar. Perseroan akan lebih selektif dan memaksimalkan sumber pendanaan pada sektor-sektor industri yang potensial. Perseroan berencana untuk memberikan fasilitas pembiayaan baru pada sektor industri pertambangan sebesar 70%, infrastruktur sebesar 30% dan sektor lainnya sebesar 10%. Jenis-jenis produk yang siap dipasarkan di tahun 2019 adalah dalam bentuk financial lease sebanyak 60%, sale and leaseback sebanyak 20%, working capital and others sebanyak 20%.

Kebijakan penyaluran pembiayaan baru di tahun 2019 diputuskan Perseroan akan diberikan kepada :

1. Good existing customer Perseroan
2. High Potential Customer dari INTA Grup
3. New customer yang bekerja pada sektor-sektor industri yang potensial.

The achievement of this business plan uses the following assumptions:

1. The Company will record new financing of Rp 312.5 billion throughout 2019
2. The Company will obtain new funding sources from lending banks or other financial institutions and will be channeled through new financing with an average interest rate of 17% p.a.
3. Aside from new financing, the Company plans to increase revenues from reactivation of foreclosed assets (AYDA) and problematic units contained in Accounts Receivable.
4. Costs incurred by the Company include costs of cooperation carried out by the Company with third parties in an effort to accelerate NPF reduction such as repossessing costs, unit improvements, legal action

MARKETING AND BUSINESS DEVELOPMENT


Seeing the condition of the Company and predicting the availability of funds, in 2019 the Company targets to book new financing of Rp 312.5 billion. The company will be more selective and maximizes funding sources in potential industrial sectors. The company plans to provide new financing facilities to the mining industry 70%, infrastructure 30% and other sectors 10%. The types of products ready to be marketed in 2019 are 60% financial leases, 20% sales and leaseback, 20% working capital and others.

In 2019, the Company has set a policy to channel new financing to:

1. Good existing customers of the Company
2. High Potential Customers of the INTA Group
3. New customers working in potential industrial sectors.

NATIONAL RESOURCES PATTERN





Natural Gas	Coal	Geo Thermal	Palm Oil	Cocoa	Tin	Nickel	Bauxite
Papua, Kalimantan	Kalimantan, Sumatra	Java, Sumatra	Kalimantan, Sumatra, Sulawesi	Sulawesi	Bangka, Sumatra	Sulawesi, Halmahera	Kalimantan, Riau Island
Est. Reserve 165 TCF with annual production of +3TCF	Largest world exporter	40% of World Reserve	Largest world exporter > 19 mio ton / year	2nd largest world producer of 770 tons / annum	2nd largest world producer of 65k tons / annum	Reserve = 12% of world reserve (4th largest in the world)	Hold 7th largest reserve in the world and 4th largest world producer

Percepatan hilirisasi sektor pertambangan Indonesia merupakan langkah nyata pemerintah dalam mendukung terjadinya nilai tambah produk di sektor tambang sekaligus juga sebagai upaya mendukung penghematan devisa negara. Proses hilirisasi di sektor tambang juga akan membawa dampak besar bagi Indonesia. Dari tahun ke tahun beberapa kali diterbitkan regulasi untuk hilirisasi. Selain meningkatkan pendapatan negara, hilirisasi juga mendorong peningkatan lapangan kerja dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara beserta turunannya menunjukkan langkah pasti pemerintah dalam mengawal kebijakan hilirisasi mineral, divestasi 51 persen dan penataan kembali Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai penegasan kembali pemanfaatan sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Sektor industri jasa pertambangan diproyeksikan makin menggeliat dan menjanjikan sejak 2018 seiring tren peningkatan harga komoditas tambang, khususnya batu bara. Indonesian Mining Association (IMA) memproyeksikan sektor pertambangan akan mengalami kebangkitan seiring tingginya permintaan akan batubara sebagai sumber energi premier pembangkit tenaga listrik.

Terkait sektor industri jasa pertambangan tentunya sangat berpengaruh pada kebutuhan pasar akan alat berat. Persaingan industri alat berat semakin lama semakin ketat. Empat merek besar yaitu Komatsu, Caterpillar, Kobelco, dan Hitachi terus berusaha memperbesar pangsa pasarnya di Indonesia. Ditambah lagi produk-produk alat berat asal China dan Belarusia yang mulai membanjiri pasar dalam negeri.

The acceleration of the downstreaming of the Indonesian mining sector is a concrete step of the government to supporting the creation of value-added products in the mining sector as well as an effort to support the country's foreign exchange savings. The downstream process in the mining sector will also have a major impact on Indonesia. From year to year several regulations have been issued for downstreaming activities. In addition to increasing state revenues, downstreaming also encourages increased employment and ultimately encourages national economic growth.

The birth of Government Regulation Number 1 of 2017 concerning the Implementation of Mineral and Coal Mining Business Activities and their derivatives shows the government's definite steps in guarding the downstreaming mining policy, 51 percent divestment and restructuring of Special Mining Business Licenses (IUPK) as a reaffirmation of the use of natural resources as much as possible for the prosperity of the people.

The mining service industry sector is projected to be increasingly stretching and promising since 2018 in line with the increasing trend in mining commodity prices, especially coal. The Indonesian Mining Association (IMA) has projected that the mining sector will experience a revival in line with the high demand for coal as the premier energy source for electricity generation.

In relation to the mining service industry sector, of course, it has a great influence on the market need for heavy equipment. The competition in the heavy equipment industry has been getting tougher. Four major brands namely Komatsu, Caterpillar, Kobelco, and Hitachi continue to try to increase their market share in Indonesia. In addition, heavy equipment products from China and Belarus have begun to flood the domestic market.

Produk alat berat asal China, meskipun belum dapat diketahui kualitas dan umur pakainya, namun secara harga dapat dikatakan sangat bersaing sehingga dapat menjadi pilihan para pelaku industri yang menggunakan alat berat dalam operasionalnya.

Pengembangan Usaha

Di tahun 2019, sebagai anak usaha PT Intraco Penta Tbk yang bergerak di sektor industri alat berat, maka Perseroan akan memfokuskan diri untuk mempertahankan pengembangan usahanya dalam industri alat berat. Perseroan memprediksi bahwa sampai dengan lima tahun kedepan, industri alat berat akan terus berkembang secara berkelanjutan.

Sebagai bentuk sinergi dengan grup usaha INTA, Perseroan akan melakukan kunjungan bersama dan mendukung penjualan grup kepada good existing key customer dan High Potential Customer. Perseroan akan mengembangkan struktur pembiayaan dengan melakukan diversifikasi produk dalam bentuk pembiayaan modal kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan calon debitur. Perseroan juga berencana akan mempersiapkan program-program promosi sebagai salah satu strategi untuk penetrasi pasar.

Selain itu, Perseroan akan berupaya untuk meraih kembali kepercayaan para dealer terutama big 5 dealer yang bergerak di penjualan alat-alat berat seperti Komatsu, Caterpillar, Kobelco, Hitachi dan Volvo agar dapat bekerja sama dengan Perseroan sehingga penyaluran pembiayaan tidak hanya terfokus pada satu merk tertentu tetapi Perseroan membuka diri untuk dapat mengembangkan pembiayaan ke alat-alat dari berbagai merk yang memiliki nilai jual yang tinggi.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan usaha, di tahun 2019 Perseroan tidak akan meluncurkan kegiatan usaha baru tetapi Perseroan akan tetap mengacu pada jenis-jenis kegiatan usaha yang tercantum dalam anggaran dasar Perseroan yang telah disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan telah dilakukan pengembalian ijin Unit Usaha Syariah (UUS) Perseroan kepada OJK, maka Perseroan tidak lagi membukukan pembiayaan syariah dan hanya melakukan monitoring dan penagihan terhadap existing account syariah Perseroan.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Perseroan memiliki kebijakan untuk membagikan dividen setidaknya sekali setahun, kecuali diputuskan lain dalam RUPS. Atas persetujuan RUPS, Direksi Perseroan akan melakukan pembagian dividen yang dalam pelaksanaannya memperhatikan kondisi keuangan dan tingkat kesehatan Perseroan. Besaran laba bersih yang berlaku bagi pembayaran dividen, sesuai peraturan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan, sebelumnya akan dilakukan penyisihan dana cadangan wajib.

Heavy equipment products from China, although their quality and service life are not yet known, but the price can be said to be very competitive so they can become good choice for industry players who use heavy equipment in their operations.

Business Development

In 2019, as a subsidiary of PT Intraco Penta Tbk engaged in the heavy equipment industry, the Company will focus on maintaining business development in the heavy equipment industry. The Company predicts that for the next five years, the industry will continue to develop in a sustainable manner.

As a form of synergy with INTA's business group, the Company will conduct joint visits and support group sales to reputable existing key customers and High Potential Customers. The company will develop a financing structure by diversifying its products in the form of working capital financing tailored to the needs of prospective debtors. The company also plans to prepare promotional programs as a strategy for market penetration.

In addition, the Company will strive to regain the trust from dealers, especially the 5 major dealers engaged in the sale of heavy equipment such as Komatsu, Caterpillar, Kobelco, Hitachi and Volvo in order to collaborate with the Company so that the distribution of funds is not only focused on one particular brand but the Company opens up to be able to develop financing for equipment from various brands that have high sales value.

In terms of conducting business activities, in 2019 the Company will not launch new business activities but rather continues to refer to the types of business activities listed in the Company's articles of association which have been adapted to the Financial Services Authority Regulations.

In connection with the return of the Company's Sharia Business Unit (UUS) license to the OJK, the Company no longer recorded sharia financing and is only monitoring and collecting the Company's existing sharia accounts.

DIVIDEND POLICY

The company has a policy to distribute dividends at least once a year, unless otherwise decided at the GMS. With the approval of the GMS, the Company's Board of Directors will make a dividend distribution which in its implementation takes into account the financial condition and soundness of the Company. The amount of net income that applies to dividend payments is in accordance with the applicable regulations and the Articles of Association of the Company, and at first a provision for mandatory reserve funds will be made.

PERUBAHAN PERATURAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP PERSEROAN

Tidak ada peraturan baru yang diterbitkan Pemerintah atau lembaga pemerintah atau regulator lainnya pada tahun 2018 yang berpengaruh signifikan terhadap Perseroan.

DAMPAK PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI TERHADAP LAPORAN KEUANGAN

Perseroan telah menerapkan standar baru, termasuk sejumlah amandemen dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018.

PROGRAM OPSI SAHAM KARYAWAN

Perseroan memberikan apresiasi kepada seluruh Direksi dan Karyawan atas kontribusi terhadap peningkatan kinerja Perseroan, sekaligus untuk meningkatkan dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja. Program yang telah dijalankan adalah Program Opsi Saham Karyawan dan Manajemen (MESOP) PT Intan Baruprana Finance Tbk. Skema ini memiliki ketentuan sebagai berikut:

1. Hak Opsi diberikan kepada Karyawan 26 hari setelah terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Hak Opsi akan didistribusikan kepada peserta MESOP dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan atau sebanyak-banyaknya 317.372.000 Hak Opsi pada waktu dipublikasikan.
3. Pelaksanaan MESOP dilakukan dalam 2 tahap, yaitu:

a. Tahap I:

Sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah hak Opsi yang diterbitkan dalam Program MESOP. Hak Opsi Tahap I yang diterbitkan memiliki masa laku (Option Life) selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penerbitannya, dan baru dapat digunakan untuk membeli saham setelah melewati periode vesting, yakni 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitannya.

b. Tahap II :

Tranche A, yaitu sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Hak Opsi Tahap II yang diterbitkan memiliki masa laku (Option Life) selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal penerbitannya, dan baru dapat digunakan untuk membeli saham setelah melewati periode vesting yakni 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitannya. Tranche B, yaitu sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah Hak Opsi Tahap II yang diterbitkan memiliki masa laku (Option Life) selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penerbitannya, dan baru dapat digunakan untuk membeli saham setelah melewati periode vesting, yakni 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penerbitannya.

Setelah program MESOP berakhir, Perseroan tidak melakukan corporate action berupa program MESOP.

CHANGES TO REGULATIONS THAT AFFECT THE COMPANY SIGNIFICANTLY

There are no new regulations issued by the Government or government institutions or other regulators in 2018 which have a significant effect on the Company.

IMPACT OF CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES ON FINANCIAL STATEMENTS

The Company has implemented new standards, including a number of amendments and interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants that are relevant to its operations and effective for the accounting period beginning January 1, 2018.

EMPLOYEE SHARE OPTION PROGRAM

The Company gives appreciation to all Directors and Employees for their contribution to improving the performance of the Company, while at the same time increasing productivity and income. The program that has been implemented is the PT Intan Baruprana Finance Tbk Employee and Management Stock Option (MESOP) Program. This scheme has the following terms and conditions:

1. Option Rights are given to Employees 26 days after being registered on the Indonesia Stock Exchange.
2. Option Rights will be distributed to MESOP participants with a maximum amount of 10% of the number of issued and fully paid shares in the Company or a maximum of 317,372,000 Option Rights at the time of publication.
3. MESOP implementation is carried out in 2 stages, namely:

a. Stage

30% (thirty percent) of the number of Option rights issued in the MESOP Program. The Option Phase I rights issued have a validity period (Option Life) for 5 (five) years from the date of issuance, and can only be used to buy shares after passing the vesting period, which is 1 (one) year from the date of issuance.

b. Stage II:

Tranche A, which is equal to 30% (thirty percent) of the number of Phase II Option Rights issued has a validity period (Option Life) for 5 (five) years, starting from the issuance date, and can only be used to buy shares after passing the vesting period namely 1 (one) year from the date of issuance. Tranche B, which is equal to 40% (forty percent) of the number of Phase II Option Rights issued has a validity period (Option Life) for 5 (five) years from the date of issuance, and can only be used to buy shares after passing the vesting period, namely 2 (two) years from the date of issuance.

After the MESOP program ended, the Company did not conduct corporate action in the form of MESOP program.



05

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Good Corporate Governance



Dasar Penerapan GCG

Basis Of GCG Implementation

Para pemangku kepentingan akan memberikan kepercayaan yang tinggi kepada Perseroan hanya bila tercapai tata kelola usaha yang baik (GCG – Good Corporate Governance). Perseroan memastikan prinsip-prinsip dasar GCG dijunjung tinggi dan diterapkan dalam pengelolaan Perseroan, untuk menjamin terlindunginya kepentingan Perseroan dan para pemangku kepentingan, serta bahwa Perseroan bertindak sesuai dengan hukum Indonesia dan etika bisnis. Oleh karena itu GCG merupakan komponen penting dalam menjalankan usaha yang berkesinambungan dan menguntungkan.

Perseroan memperoleh keuntungan dengan implementasi GCG, yang mendorong kerjasama dan hubungan yang baik antara fungsi pengurusan dan fungsi pengawasan antar organ GCG. Hal ini sejalan dengan pemenuhan terhadap ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan, peraturan pemerintah dan badan regulasi lainnya seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI) serta Anggaran Dasar Perseroan. Rangkaian ketentuan pelaksanaan GCG merupakan suatu kesatuan utuh dan tidak terpisahkan, yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM).
3. Peraturan-peraturan di bidang Pasar Modal baik yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK, atau peraturan yang sebelumnya dikeluarkan oleh BAPEPAM-LK), Bursa Efek Indonesia atau regulator pasar modal lainnya.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.
5. Anggaran Dasar Perseroan.
6. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKG).
7. Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang dikeluarkan oleh OJK.

Bagi Perseroan, tujuan penerapan GCG adalah untuk :

1. Mengarahkan dan mengendalikan hubungan kerja Organ Perseroan yaitu antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Meningkatkan pertanggungjawaban pengelolaan Perseroan kepada Pemegang Saham dengan tetap memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan;
3. Menjadi dasar implementasi dan pengembangan Budaya Perseroan;

Stakeholders will only give high trust to the Company if good corporate governance (GCG) is achieved. The Company ensures that the basic principles of GCG are upheld and implemented in the management of the Company, to ensure protection of the interests of the Company and its stakeholders, and that the Company acts in accordance with Indonesian law and business ethics. Therefore GCG is an important component in carrying out a sustainable and profitable business.

The Company benefits from the implementation of GCG, which encourages cooperation and good relations between the management functions and the supervisory functions among GCG organs. This is in line with the fulfillment of the provisions stipulated in legislation, government regulations and other regulatory bodies such as the Financial Services Authority (OJK), the Indonesia Stock Exchange (IDX) and the Articles of Association of the Company. The series of provisions for the implementation of GCG is a whole and inseparable entity, which consists of:

1. Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT).
2. Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets (UUPM).
3. Capital Market Regulations issued by the Financial Services Authority (OJK, or regulations previously issued by BAPEPAM-LK), the Indonesia Stock Exchange or other capital market regulators.
4. Financial Services Authority Regulation No. 30 / POJK.05 / 2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Companies.
5. The Articles of Association of the Company.
6. General Guidelines for Good Corporate Governance Indonesia issued by the National Committee on Corporate Governance (KNKG).
7. Roadmap of Corporate Governance Indonesia issued by OJK.

For the Company, the goals of implementing GCG are:

1. Directing and controlling the Company's Organ working relationships, namely between Shareholders, Board of Commissioners and Directors;
2. Increasing the accountability of the Company's management to the Shareholders while taking into account the interests of the stakeholders;
3. Become the basis for the implementation and development of the Corporate Culture;

4. Mendorong dan mendukung pengembangan usaha, alokasi sumber daya Perseroan dan pengelolaan risiko yang efektif sehingga menjamin peningkatan nilai Perseroan yang berkelanjutan;
5. Mengarahkan pencapaian visi dan misi Perseroan serta meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Efektivitas penerapan GCG akan berjalan dengan kuatnya struktur dan sistem yang memberikan perlindungan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya semaksimal mungkin. Karena itu struktur dan sistem GCG Perseroan didasarkan pada:

Prinsip-prinsip GCG, yang meliputi:

- a. **Transparansi**, dimana Perusahaan senantiasa memberikan informasi kepada pemegang saham, pemangku kepentingan, kreditur dan pihak-pihak yang terkait, mengenai kejadian penting Perusahaan, termasuk laporan kinerja keuangan Perusahaan.
- b. **Akuntabilitas**, dengan adanya fungsi, tugas, dan tanggung jawab organ Perusahaan yakni Direksi, Dewan Komisaris, dan RUPS, berjalan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, sehingga pengelolaan Perusahaan berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien.
- c. **Pertanggungjawaban**, dimana Perusahaan senantiasa mematuhi ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan serta peraturan perundangan yang berlaku dan nilai-nilai etika.
- d. **Kemandirian**, melalui pengelola Perusahaan secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
- e. **Kewajaran**, bahwa dalam melaksanakan kegiatannya, Perusahaan senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas keadilan dan kesetaraan.

Visi dan Misi Perusahaan, yang meliputi:

Visi Perusahaan

Menjadi perusahaan pembiayaan lapis pertama dalam industri keuangan di Indonesia.

Misi Perusahaan

Menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan, serta membangun dan berkembang bersama wirausahawan lokal yang berkeinginan tinggi.

Nilai – nilai utama Perusahaan, melalui penegakan GCG, menghormati seluruh pemangku kepentingan, mempraktekkan profesionalisme yang tinggi dan memiliki karakter yang jujur.

4. Encourage and support business development, allocation of Company resources and effective risk management so as to ensure an increase in the Company's sustainable value;
5. Directing the achievement of the Company's vision and mission as well as increasing the professionalism of human resources;

CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE

The effectiveness of the implementation of GCG will run with the strength of structures and systems that provide protection of the interests of shareholders and other stakeholders as much as possible. Therefore the Company's GCG structure and system are based on:

GCG principles, which include:

- a. **Transparency**, where the Company always provides information to shareholders, stakeholders, creditors and related parties regarding important Company events, including the Company's financial performance reports.
- b. **Accountability**, with the existence of functions, duties, and responsibilities of the Company's organs, namely the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the GMS, run in accordance with their authority, so that the management of the Company runs transparently, fairly, effectively and efficiently.
- c. **Responsibility**, where the Company always adheres to the provisions of the Company's Articles of Association as well as applicable laws and regulations, and ethical values.
- d. **Independence**, through management of the Company independently and professionally and free from conflicts of interest and influence or pressure from any party.
- e. **Fairness**, that in carrying out its activities, the Company always pays attention to the interests of shareholders and other stakeholders based on the principles of justice and equality

Company Vision and Mission, which includes:

Company Vision

Become the first tier finance company in the financial industry in Indonesia.

Company Mission

Creating employment and prosperity, as well as building and developing with high-desire local entrepreneurs.

The Company's main values, through the enforcement of GCG, respect all stakeholders, practice high professionalism and have honest character.

Kode Etik Perusahaan, sebagai sebuah ketentuan dasar atas hal-hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam berinteraksi dengan pihak-pihak lain, baik internal maupun eksternal, yang perlu ditaati oleh manajemen dan karyawan PT. Intan Baruprana Finance, Tbk.

Pedoman Perilaku Perusahaan, yang mengacu pada nilai inti kelompok usaha INTRACO PENTA: "CINTA"

The Company's Code of Ethics, as a basic provision for things that must be done and should not be done in interacting with other parties, both internal and external, that must be adhered to by management and employees of PT. Intan Baruprana Finance, Tbk

Company Code of Conduct, which refers to the core values of INTRACO PENTA business group: "LOVE"

"COLLABORATIVE"

Kemampuan mengidentifikasi peluang-peluang dan mengambil tindakan untuk membangun hubungan yang positif dan strategis antar individu, kelompok, departemen, unit atau organisasi untuk membantu mencapai tujuan bisnis.

The ability to identify opportunities and take action to build positive and strategic relationships among individuals, groups, departments, units or organizations to help achieve business goals.

"INNOVATIVE"

Kemampuan untuk melakukan perbaikan, pengembangan terus menerus dan menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata dengan tujuan memperbaiki proses bisnis untuk dapat menghasilkan kinerja yang maksimal.

The ability to make improvements, continuous development and create something new, both in the form of ideas and real work with the aim of improving business processes to be able to produce maximum performance.

"NETWORK"

Kemampuan untuk mengembangkan hubungan luas yang bermanfaat dengan berbagai kalangan orang dari berbagai institusi internal dan eksternal baik yang berhubungan ataupun tidak dengan bidang pekerjaan.

The ability to develop broad, useful relationships with various groups of people from various internal and external institutions both related and not related in the field of work.

"TRUSTWORTHY"

Kemampuan untuk bisa diandalkan, dipercaya dan membangun hubungan yang hangat dan saling menguntungkan di lingkungan kerja.

The ability to be reliable, trustworthy and build warm and mutually beneficial relationships in the work environment.

"ASSURANCE"

Kemampuan dalam memberikan keyakinan dan kepastian terhadap tindakan dalam aktivitas kerja dilakukan sesuai dengan standar (waktu, kualitas dan biaya) yang ditetapkan.

The ability to provide confidence and certainty about actions in work activities is carried out in accordance with the standards (time, quality and cost) set.

Struktur yang dimiliki Perseroan berjalan seiring dengan Peraturan OJK (POJK) No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka (POJK 21/2015) dan Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka (SEOJK 32/2015). Sebagai ketentuan teknis pelaksanaan GCG bagi perusahaan publik, Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka mencakup 5 Aspek, 8 Prinsip dan 25 rekomendasi, dimana pada tahun 2018 Perseroan mulai menerapkan berbagai rekomendasi penerapan GCG sebagai berikut:

The structure owned by the Company goes hand in hand with OJK Regulation (POJK) No. 21 / POJK.04 / 2015 concerning Application of Public Company Governance Guidelines (POJK 21/2015) and OJK Circular Letter (SEOJK) No. 32 / SEOJK.04 / 2015 concerning Guidelines for Public Company Governance (SEOJK 32/2015). As a technical provision for the implementation of GCG for public companies, the Guidelines for Public Company Governance include 5 Aspects, 8 Principles and 25 recommendations, in which in 2018 the Company began implementing various recommendations for implementing GCG as follows:

No.	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Implementasi (ya/tidak) Implementation (yes/no)
Aspek 1: Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham; Aspect 1: Public Company Relationship with Shareholders in Guaranteeing the Rights of Shareholders;			
1	Prinsip 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan RUPS Principle 1 Increase the Value of Holding GMS	1 Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham. The Public Company has technical methods or procedures for voting both openly and closed, which prioritizes the independence and interests of shareholders.	✓
		2 Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan. All members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Public Company are present at the Annual GMS.	✓
		3 Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun. A summary of the minutes of the GMS is available on the Public Company Website for at least 1 (one) year.	✓
2	Prinsip 2 Prinsip 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor. Principle 2 Improve the Quality of Public Company Communication with Shareholders or Investors.	4 Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. The Public Company has a communication policy with shareholders or investors.	✓
		5 Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web. The Public Company discloses the communication policy of the Public Company with shareholders or investors on the Website.	✓

No.	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Implementasi (ya/tidak) Implementation (yes/no)
Aspek 2: Fungsi dan Peran Dewan Komisaris Aspect 2: Function and Role of the Board of Commissioners			
3	Prinsip 3 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris Principle 3 Strengthening the Membership and Composition of the Board of Commissioners	6 Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka. Determination of the number of members of the Board of Commissioners considers the condition of the Public Company.	✓
		7 Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Determination of the composition of members of the Board of Commissioners takes into account the diversity of expertise, knowledge and experience needed.	✓
4	Prinsip 4 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris. Principle 4 Improving the Quality of Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners.	8 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (Self Assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. The Board of Commissioners has a Self-Assessment policy to appraise the performance of the Board of Commissioners.	✓
		9 Kebijakan penilaian sendiri (Self Assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. The Self-Assessment policy to appraise the performance of the Board of Commissioners is expressed through the Company's Annual Report.	✓
		10 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. The Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of members of the Board of Commissioners if involved in financial crimes.	✓
		11 Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi. The Board of Commissioners or the Committee that carries out the Nomination and Remuneration function composes a succession policy in the process of nominating members of the Board of Directors.	✓
Aspek 3: Fungsi Dan Peran Direksi Aspect 3: Function and Role of the Board of Directors			
5	Prinsip 5 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi. Principle 5 Strengthening the Membership and Composition of the Board of Directors.	12 Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan. Determination of the number of members of the Board of Directors considers the condition of the Public Company and effectiveness in decision-making.	✓
		13 Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Determination of the composition of members of the Board of Directors takes into account the diversity of expertise, knowledge and experience needed.	✓
		14 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. The member of the Board of Directors in charge of accounting or finance has expertise and / or knowledge in the field of accounting.	✓

No.	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Implementasi (ya/tidak) Implementation (yes/no)
6	Prinsip 6 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi. Principle 6 Improving the Quality of Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Directors.	15 Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (Self Assessment) untuk menilai kinerja Direksi. The Board of Directors has a Self-Assessment policy to appraise the performance of the Board of Directors.	✓
		16 Kebijakan penilaian sendiri (Self Assessment) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka. The Self-Assessment policy to appraise the performance of the Board of Directors is expressed through the Company's Annual Report.	✓
		17 Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. The Board of Directors has a policy regarding the resignation of members of the Board of Directors if involved in financial crimes.	✓
Aspek 4: Partisipasi Pemangku Kepentingan Aspect 4: Stakeholder Participation			
7	Prinsip 7 Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan. Principle 7 Enhancing Corporate Governance Aspects through Stakeholder Participation.	18 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading. The Public Company has a policy to prevent insider trading.	✓
		19 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti Fraud. The Public Company has an anti-corruption and anti-fraud policy.	✓
		20 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor. The Public Company has a policy regarding the selection and improvement of the ability of suppliers or vendors.	✓
		21 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur. The Public Company has a policy on fulfilling the rights of creditors.	✓
		22 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem whistleblowing. The Public Company has a whistleblowing system policy.	✓
		23 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan The Public Company has a policy of providing long-term incentives to Directors and employees.	✓
Aspek 5 : Keterbukaan Informasi Aspect 5 : Information Disclosure			
8	Prinsip 8 Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi. Principle 8 Improving the Implementation of Information Disclosure.	24 Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi. The Public Company utilizes the use of information technology more broadly than the Website as a medium for information disclosure.	✓
		25 Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali. The Annual Report of the Public Company discloses the final beneficial owner in the ownership of the Public Company of at least 5% (five percent), in addition to the disclosure of the final beneficial owner in the shareholding of the Public Company through major and controlling shareholders.	✓

Kedepannya Perseroan akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelaksanaan GCG sehingga dapat menjadi salah satu yang terdepan dalam implementasinya.

ORGAN PERSEROAN

Terdapat tiga organ sebagai pilar utama pelaksana GCG yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Ketiga organ tersebut terikat pada tugas dan tanggung jawabnya serta senantiasa mematuhi ketentuan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan lainnya. Selain itu dalam menjalankan pengelolaan Perseroan dan mengambil segala keputusan, Organ Perseroan senantiasa menjunjung tinggi nilai etika bisnis & etika kerja serta menyadari adanya tanggung jawab Perseroan terhadap para pemangku kepentingan.

Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi merupakan organ utama dalam struktur tata kelola Perseroan. Rujukan utama organ perusahaan adalah Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu bahwa:

- a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ Perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perusahaan.
- b. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta memberi nasehat kepada Direksi.
- c. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Organ utama ini ditambah dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang sejalan dengan kegiatan usaha pembiayaan syariah yang dimiliki Perseroan. Sebagai sebuah organ independent DPS ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional ("DSN") Majelis Ulama Indonesia yang bertugas mengawasi kegiatan usaha agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.

Untuk memperkuat pelaksanaan GCG, Dewan Komisaris dan Direksi dapat memiliki organ penunjang, dalam bentuk komite-komite di bawah Dewan Komisaris dan komite-komite di bawah Direksi Perseroan. Dalam pelaksanaannya, Dewan Komisaris dan Direksi juga ditunjang oleh keberadaan Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal dan Kepala-Kepala Divisi. Secara lengkap struktur Tata Kelola Perusahaan dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

In the future, the Company will continue to strive to improve the quality of GCG implementation so that it can be one of the foremost in its implementation.

COMPANY ORGANS

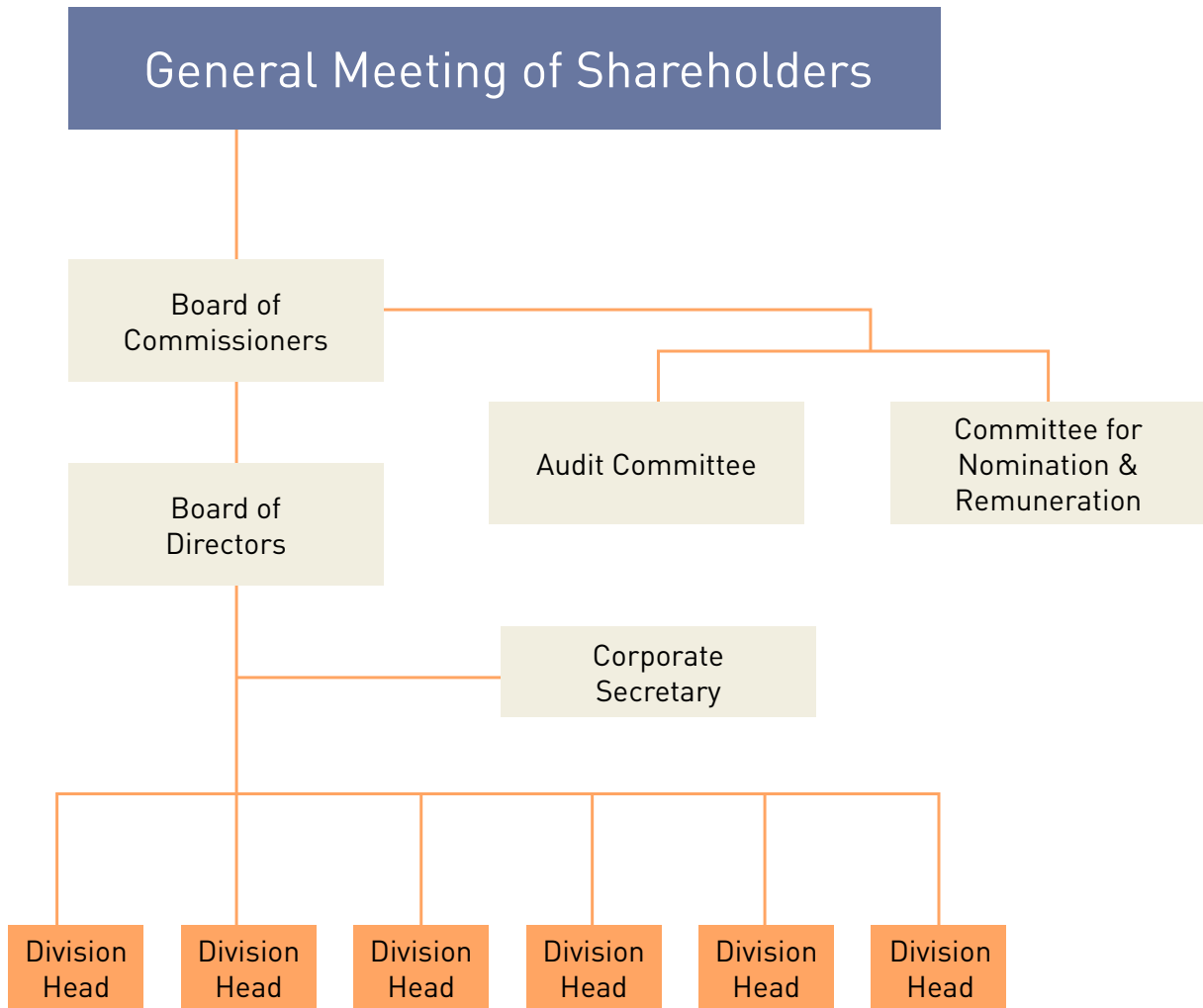
There are three organs as the main pillars of implementing GCG consisting of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners and the Board of Directors. The three organs are bound to their duties and responsibilities and always comply with statutory provisions, the Company's Articles of Association and other provisions. In addition to carrying out the management of the Company and making all decisions, the Organs of the Company always uphold the values of business ethics & work ethics and are aware of the Company's responsibility to its stakeholders

The General Meeting of Shareholders, the Board of Commissioners and the Board of Directors are the main organs in the Company's governance structure. The main reference for company organs is Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and the Articles of Association of the Company, namely that:

- a. The General Meeting of Shareholders (GMS) is the Company Organ that has authority not given to the Board of Directors or the Board of Commissioners within the specified limit of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and the Articles of Association of the Company.
- b. The Board of Commissioners is the Organ of the Company whose duty is to carry out supervision in general and / or specifically in accordance with the Articles of Association of the Company and provide advice to the Board of Directors.
- c. The Board of Directors is the Company Organ that is authorized and fully responsible for the management of the Company and for the benefit of the Company, in accordance with the purposes and objectives of the Company and represents the Company, both inside and outside the court in accordance with the Articles of Association.

These main organs are added with the Sharia Supervisory Board (DPS) which is in line with the sharia finance business activities carried out by the Company. As an independent organ the DPS is placed by the National Sharia Council ("DSN") of the Indonesian Ulama Council (MUI) which is tasked with supervising business activities so as not to deviate from the sharia provisions and principles that have been stated by the DSN.

To strengthen the implementation of GCG, the Board of Commissioners and Board of Directors can have supporting organs, in the form of committees under the Board of Commissioners and committees under the Board of Directors of the Company. In its implementation, the Board of Commissioners and the Board of Directors are also supported by the presence of the Corporate Secretary, Internal Audit Unit and Division Heads. The complete structure of Corporate Governance can be seen in the chart below:



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Perseroan memiliki dua jenis Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan selambatnya enam bulan setelah tahun buku berakhir. Kedua Rapat Umum Pemegang Saham lainnya atau yang disebut sebagai Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa (RUPSLB), yang bersifat kondisional, artinya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

Landasan pelaksanaan RUPS adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 32/2014) juncto POJK No. 10/POJK.04/2017 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)

The Company has two types of General Meeting of Shareholders (GMS), consisting of the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) held no later than six months after the financial year ended. Second is another General Meeting of Shareholders or called the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM), which is conditional, meaning that it can be held at any time based on needs.

The foundation of the implementation of the GMS is Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT) and the Company's Articles of Association and Financial Services Authority Regulation No. 32 / POJK.04 / 2014 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders for Public Companies (POJK 32/2014) juncto POJK No. 10 / POJK.04 / 2017 concerning changes to Financial Services Authority Regulation No. 32 / POJK.04 / 2014.

Pada tahun 2018 Perseroan melaksanakan satu kali RUPST dan empat kali RUPSLB sebagai berikut:

In 2018 the Company carried out one AGM and four EGM with the following decisions:

Keputusan Rapat

Implementasi /
Implementation

Meeting Decision

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 8 Januari 2018
Extraordinary General Meeting of Shareholders on January 8, 2018



1 Menerima permohonan pengunduran diri dan memberhentikan Tuan Dani Firmansjah selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat dengan ucapan Terima Kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen.

Dengan demikian susunan Dewan Komisaris sejak Saudara Dani Firmansjah mengundurkan diri sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris
Komisaris: **Petrus Halim**

2 Memberi kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan perubahan susunan Dewan Komisaris kepada kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

1 Accept resignation request and dismiss Mr. Dani Firmansjah as President Commissioner and Independent Commissioner of the Company as of the closing date of the Meeting with gratitude for the contribution of energy and thought given during his tenure as President Commissioner and Independent Commissioner.

Thus the composition of the Board of Commissioners since Mr Dani Firmansjah resigned as President Commissioner and Independent Commissioner is as follows:

Board of Commissioners
Commissioner: **Petrus Halim**

2 Give power and authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to take all necessary actions relating to the decisions of this Agenda in accordance with the applicable laws and regulations, including to declare in a separate Notarial Deed and notify changes in the composition of the Board of Commissioners to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with applicable laws and regulations.

Keputusan Rapat

Implementasi /
Implementation

Meeting Decision

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 26 Maret 2018
Extraordinary General Meeting of Shareholders on March 26, 2018



- 1 Menyetujui mengangkat Saudara Kurniawan Saktiaji sebagai Direktur terhitung sejak tanggal mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan terhadap Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit & proper test) terhadap pengangkatan yang bersangkutan selaku Direktur Perseroan dengan masa jabatan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu.

Dengan demikian, susunan Direksi sejak Saudara Kurniawan Saktiaji mendapatkan persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit & proper test) dari Otoritas Jasa Keuangan, adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur (Tidak Terafiliasi) :
Alexander Reyza
Direktur (Tidak Terafiliasi) :
Noel Krisnandar Yahja
Direktur (Tidak Terafiliasi) :
Kurniawan Saktiaji

- 2 Menyetujui mengangkat Saudara Willy Rumondor sebagai Komisaris Independen terhitung sejak tanggal lulus uji Kemampuan dan Kepatutan (fit & proper test) dari Otoritas Jasa Keuangan terhadap pengangkatan yang bersangkutan selaku Komisaris Independen Perseroan dengan masa jabatan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu.

1. Approve to appoint Mr. Kurniawan Saktiaji as Director as of the date of obtaining approval from the Financial Services Authority of passing the fit & proper test for the appointment of the relevant Director of the Company with the term of office stipulated in the Company's Articles of Association and with due observance of Capital Market regulations, but without reducing the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss the person concerned at any time

Thus, the composition of the Board of Directors since Mr. Kurniawan Saktiaji passed the fit & proper test from the Financial Services Authority is as follows:

Board of Directors:

Director (Unaffiliated) :
Alexander Reyza
Director (Unaffiliated) :
Noel Krisnandar Yahja
Director (Unaffiliated) :
Kurniawan Saktiaji

- 2 Approve to appoint Mr. Willy Rumondor as Independent Commissioner as of the date of passing the Fit and Proper test from the Financial Services Authority for the appointment of the relevant Commissioner of the Company with term of office as stipulated in the Articles of Association of the Company and by observing Capital Market regulations, but without reducing the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss the person concerned at any time.

Keputusan Rapat

Implementasi /
Implementation

Meeting Decision

Dengan demikian susunan Dewan Komisaris sejak Saudara Willy Rumondor mendapatkan persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit & proper test) dari Otoritas Jasa Keuangan, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : **Petrus Halim**

Komisaris Independen : **Willy Rumondor**

- 3 Memberi kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan RUPS terkait Mata Acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta meminta kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) terhadap calon Direktur dan calon Komisaris Independen Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Thus the composition of the Board of Commissioners since Mr. Willy Rumondor passed the fit & proper test from the Financial Services Authority is as follows::

Board of Commissioners

Commissioner : **Petrus Halim**

Independent Commissioner : **Willy Rumondor**

- 3 Give power and authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to take all necessary actions relating to the GMS decisions related to this Agenda in accordance with applicable laws and regulations, including to declare in a separate Notarial Deed and notify changes in the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners to the Ministry Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and request the Financial Services Authority to conduct Fit & Proper Tests on prospective Directors and Independent Commissioner in accordance with applicable laws and regulations

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 16 Mei 2018
Annual General Meeting of Shareholders dated May 16, 2018

Agenda Pertama Rapat

Menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2017, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2017 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan suatu hal sebagaimana dinyatakan dalam Laporan No. PHHARP/429/NAR/RVD/2018, tanggal 29 Maret 2018.

Dengan diberikannya persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan 31 Desember 2017 oleh Rapat, maka membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquitt et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada buku-buku Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan.

Agenda Kedua Rapat

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris atas rekomendasi Komite Audit untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan

First Agenda of the Meeting

Approve the Annual Report submitted by the Board of Directors regarding the condition and running of the Company during Fiscal Year 2017, including the Company Activity Report, Board of Commissioners Supervision Report during Fiscal Year 2017 and ratify the Company's Financial Statements that ended on December 31, 2017 audited by Public Accounting Firm Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Partners with opinions without modification with paragraphs emphasizing matters as stated in Report No. PHHARP / 429 / NAR / RVD / 2018 of March 29, 2018.

With the approval of the Company's Annual Report 2017 and the ratification of the Company's December 31, 2017 Financial Statements by the Meeting, it frees members of the Board of Directors and Board of Commissioners from responsibility and liability (acquitt et de charge) for management and supervision actions that have been carried out during Fiscal Year 2017, insofar as such actions are recorded in the Company's books and do not conflict with the provisions and regulations.

Second Agenda of the Meeting

Approve the authorization of the Board of Commissioners on the recommendation of the Audit Committee to Appoint a Public Accounting Firm (KAP) that will audit

Keputusan Rapat

Implementasi /
Implementation

Meeting Decision



mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018, Menetapkan honorarium KAP tersebut serta persyaratan lain penunjukannya, dan Menunjuk KAP Pengganti dalam hal KAP yang telah ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018.

Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris tersebut diberikan dengan pertimbangan bahwa sebelum dilakukan penunjukan KAP, Perseroan harus terlebih dahulu melakukan review dan membahas jumlah honorarium serta persyaratan penunjukan KAP. Adapun KAP yang ditunjuk harus memenuhi kriteria, yaitu : Telah tercatat dan terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, Merupakan KAP yang termasuk dalam peringkat 10 (sepuluh) besar, Memiliki pengalaman melakukan audit terhadap Perusahaan Terbuka, serta Independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan.

Agenda Ketiga Rapat

Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Gaji, Uang Jasa atau Honorarium, dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2018 dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Agenda Keempat Rapat

Menyetujui tindakan Direksi Perseroan untuk menjaminkan Aset Perseroan dengan nilai melebihi 50% Aset Bersih Perseroan, dalam rangka perolehan pendanaan bagi operasional dan penunjang kegiatan utama Perseroan, dari lembaga perbankan maupun lembaga keuangan non bank dan Masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan Persetujuan Dewan Komisaris untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan penjaminan aset sepanjang diperlukan dengan memperhatikan peraturan dan perundangan yang berlaku.

the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2018, Determine KAP honorarium and other terms of appointment, and Appoint a Replacement KAP in the case that the appointed KAP, because of any reason cannot complete the audit task of the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2018.

The granting of authority to the Board of Commissioners is given with the consideration that before the appointment of KAP, the Company must first conduct a review and discuss the amount of honorarium and requirements for appointment of KAP. The appointed KAP must meet the criteria, namely: Has been listed and registered with the Financial Services Authority, Is included in the 10 (ten) largest KAPs, has experience conducting audit of public companies, and is independent and has no conflict of interest with the Company.

Third Agenda of the Meeting

Approve to give power and authority to the Board of Commissioners of the Company to determine Salary, Service Fee or Honorarium, and other benefits of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for 2018 by considering recommendations from the Nomination and Remuneration Committee.

Fourth Agenda of the Meeting

Approve the actions of the Board of Directors of the Company to pledge the Company's Assets with a value exceeding 50% of the Company's Net Assets, in order to obtain funding for operations and supporting the Company's main activities, from banking institutions and non-bank financial institutions and the Community. In connection with this matter, give power and authority to the Board of Directors of the Company with the Board of Commissioners' Approval to take all necessary measures to carry out pledging assets as long as needed by taking into account the applicable laws and regulations.

Keputusan Rapat

Implementasi /
Implementation

Meeting Decision

Agenda Kelima Rapat

- 1 Menyetujui mengangkat Saudara Erry Sulistio sebagai Komisaris Perseroan dan Saudara Willy Rumondor sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak tanggal lulus uji Kemampuan dan Kepatutan (fit & proper test) dari Otoritas Jasa Keuangan terhadap pengangkatan yang bersangkutan masing-masing selaku Komisaris Perseroan dan Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan dengan masa jabatan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu.

Dengan demikian susunan Anggota Dewan Komisaris sejak Saudara Erry Sulistio dan Saudara Willy Rumondor mendapatkan persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit & proper test) dari Otoritas Jasa Keuangan, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen:
Willy Rumondor
Komisaris : **Petrus Halim**
Komisaris : **Erry Sulistio**

- 2 Memberhentikan dengan hormat Saudara Noel Krisnandar Yahja sebagai Direktur Perseroan yang diangkat berdasarkan RUPS LB tanggal 19 September 2016. Pemberhentian anggota Direksi tersebut terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan;
- 3 Menyetujui mengangkat Saudari Carolina Dina Rusdiana sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak tanggal lulus uji Kemampuan dan Kepatutan (fit & proper test) dari Otoritas Jasa Keuangan terhadap pengangkatan yang bersangkutan selaku Direktur Utama Perseroan dengan masa jabatan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu.

Dengan demikian, susunan Anggota Direksi sejak Saudara Noel Krisnandar Yahja diberhentikan dengan hormat dan Saudari Carolina Dina Rusdiana mendapatkan persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit & proper test) dari Otoritas Jasa Keuangan, adalah sebagai berikut :

Fifth Agenda of the Meeting

- 1 Approve the appointment of Mr. Erry Sulistio as Commissioner of the Company and Mr. Willy Rumondor as President Commissioner concurrently as Independent Commissioner of the Company as of the date of passing the fit & proper tests from the Financial Services Authority regarding the respective appointments as Commissioners of the Company and President Commissioner concurrently as Independent Commissioner of the Company with the term of office as stipulated in the Articles of Association of the Company and by observing Capital Market regulations, but without reducing the rights of the GMS to dismiss the person concerned at any time.

Thus, the composition of the Board of Commissioners since Mr. Erry Sulistio and Mr. Willy Rumondor passed the fit & proper tests from the Financial Services Authority is as follows:

Board of Commissioners :

President Commissioner concurrently Independent Commissioner: **Willy Rumondor**
Commissioner: **Petrus Halim**
Commissioner: **Erry Sulistio**

- 2 Honorably dismiss Mr. Noel Krisnandar Yahja as Director of the Company previously appointed based on the EGM on September 19, 2016. Dismissal of the member of the Board of Directors as of the closing date of this Meeting is with gratitude for the contribution of energy and thought given while serving as a member of the Company's Board of Directors;
- 3 Approve the appointment of Ms Carolina Dina Rusdiana as the President Director of the Company as of the date of passing the Fit and Proper test from the Financial Services Authority on the appointment of the relevant President Director of the Company with term of office as stipulated in the Articles of Association and with due regard to Capital Market regulations, but without reducing the rights of the GMS to dismiss the person concerned at any time.

Thus, the composition of the Board of Directors since Mr. Noel Krisnandar Yahja was honorably dismissed and Ms Carolina Dina Rusdiana passed the Fit and Proper Test from the Financial Services Authority is as follows:

Keputusan Rapat

Implementasi /
Implementation

Meeting Decision

Direksi :

Direktur Utama (Tidak Terafiliasi) :

Carolina Dina Rusdiana

Direktur (Tidak Terafiliasi) : **Alexander Reyza**

Direktur (Tidak Terafiliasi) : **Kurniawan Saktiaji**

Board of Directors:

President Director (Unaffiliated) : **Carolina Dina**

Rusdiana

Director (Unaffiliated) : **Alexander Reyza**

Director (Unaffiliated) : **Kurniawan Saktiaji**

- | | |
|---|---|
| <p>4. Memberi kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan RUPS terkait Mata Acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta meminta kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) terhadap calon Direktur Utama, calon Komisaris dan calon Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> | <p>4 Give power and authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to take all necessary actions related to the GMS decisions related to this Agenda in accordance with the applicable laws and regulations, including to declare in a separate Notarial Deed and notify changes in the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and request the Financial Services Authority to conduct Fit and Proper Tests on prospective Managing Directors, candidates for Commissioners and candidates for the President Commissioner concurrently Independent Commissioner of the Company in accordance with the applicable laws and regulations.</p> |
|---|---|

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 5 Juni 2018
Extraordinary General Meeting of Shareholders on June 5, 2018

Agenda Pertama Rapat

- 1 Menyetujui untuk melaksanakan Penggabungan Nilai Nominal Saham (Reverse Stock) dengan cara melakukan pengurangan saham terhadap seluruh saham-saham dari Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, dimana sebanyak-banyaknya setiap 10 (sepuluh) saham dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) per saham akan mengalami perubahan menjadi 1 (satu) saham dengan nilai nominal sebanyak-banyaknya Rp 1000,- (seribu Rupiah) per saham.
- 2 Menyetujui pemberian kewenangan dan kuasa kepada Direktur Perseroan untuk menentukan besaran jumlah penggabungan Nilai Nominal saham (Reverse Stock), termasuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan melakukan segala sesuatu yang dianggap baik dan perlu, serta tunduk kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasar modal.

Agenda Kedua Rapat

Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi untuk melakukan dan melaksanakan konversi utang menjadi saham biasa dalam rangka berdasarkan dan melaksanakan keputusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah dihomologasi dengan Nomor Perkara 123/PDT.SUS.PKPU/2017/PN.NIAGA/JKT.PST tanggal 10 April 2018 (untuk selanjutnya disebut dengan "KONVERSI") dengan melakukan Penambahan Modal Tanpa

First Agenda of the Meeting

- 1 Approve to carry out Merger of Stock Nominal Value (Reverse Stock) by making a reduction in the shares of all shares of the Company that have been issued and fully paid, where as many as every 10 (ten) shares with a nominal value of Rp 100, - (one hundred Rupiah) per share will change to 1 (one) share with a nominal value of up to Rp 1,000 (one thousand Rupiah) per share.
- 2 Approve the granting of power and authority to the Board of Directors of the Company to determine the amount of Merger of Share Nominal Value (Reverse Stock), including making amendments to the Articles of Association of the Company and doing everything deemed good and necessary, and subject to applicable laws and regulations, especially capital market regulations.

Second Agenda of the Meeting

Approve to grant authority to the Board of Directors to carry out and implement the conversion of debt into ordinary shares in the framework of and implement the Commercial Court ruling at the Central Jakarta District Court which has been homologized with Case Number 123 / PDT.SUS.PKPU / 2017 / PN.NIAGA / JKT.PST dated April 10, 2018 (hereinafter referred to as "CONVERSION") by carrying out Capital Additions without Providing Pre-emptive Rights ("PMTHMETD")

Keputusan Rapat

Implementasi /
Implementation

Meeting Decision



Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") berdasarkan POJK 38/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada PT Intraco Penta Tbk dan PT Inta Trading serta kepada 2 (dua) Kreditur Separatis yang menolak yakni PT Bank MNC Internasional Tbk dan Maybank Syariah, setelah dilakukannya eksekusi jaminan oleh Kreditur Separatis yang menolak tersebut.

based on POJK 38/2014 concerning Public Company Capital Additions without Providing Pre-emptive Rights to PT Intraco Penta Tbk and PT Inta Trading and 2 (two) Separatist Creditors who have refused namely PT Bank MNC Internasional Tbk and Maybank Syariah, after the execution of collateral by the Separatist Creditors who have refused.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 15 Agustus 2018
Extraordinary General Meeting of Shareholders on August 15, 2018



Agenda Pertama Rapat

Menyetujui Penegasan konversi utang menjadi saham biasa Perseroan berdasarkan dan untuk melaksanakan keputusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah dihomologasi dengan Nomor Perkara 123/PDT.SUS.PKPU/2017/ PN.NIAGA/JKT.

First Agenda of the Meeting

Approve Affirmation of conversion of debt into ordinary shares of the Company based on and to carry out the decision of the Commercial Court at the Central Jakarta District Court which has been homologized with Case Number 123 / PDT.SUS.PKPU / 2017 /

Keputusan Rapat

Implementasi /
Implementation

Meeting Decision

PST tanggal 10 April 2018 (untuk selanjutnya disebut dengan "KONVERSI") dengan melakukan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") berdasarkan POJK 38/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada PT Intraco Penta Tbk (atau "INTA") dan PT Inta Trading (atau "IT") serta kepada 2 (dua) Kreditur Separatis yang menolak yakni PT Bank MNC Internasional Tbk dan Maybank Syariah, setelah dilakukannya eksekusi jaminan oleh Kreditur Separatis yang menolak tersebut yang telah disetujui dalam RUPSLB pada tanggal 5 Juni 2018 dengan Harga Pelaksanaan INTA dan IT adalah sebesar Rp515,- (lima ratus lima belas Rupiah). Sedangkan Harga Pelaksanaan Kreditur Separatis Yang Menolak ditetapkan 5 (lima) kali dari Harga Pelaksanaan Kreditur INTA dan IT berdasarkan Putusan Pengadilan.

Agenda Kedua Rapat

Menyetujui Penegasan konversi utang menjadi saham biasa Perseroan berdasarkan dan untuk melaksanakan keputusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah dihomologasi dengan Nomor Perkara 123/PDT.SUS.PKPU/2017/ PN.NIAGA/JKT. PST tanggal 10 April 2018 (untuk selanjutnya disebut dengan "KONVERSI") dengan melakukan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") berdasarkan POJK 38/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada PT Intraco Penta Tbk (atau "INTA") dan PT Inta Trading (atau "IT") serta kepada 2 (dua) Kreditur Separatis yang menolak yakni PT Bank MNC Internasional Tbk dan Maybank Syariah, setelah dilakukannya eksekusi jaminan oleh Kreditur Separatis yang menolak tersebut yang telah disetujui dalam RUPSLB pada tanggal 5 Juni 2018 dengan Harga Pelaksanaan INTA dan IT adalah sebesar Rp515,- (lima ratus lima belas Rupiah). Sedangkan Harga Pelaksanaan Kreditur Separatis Yang Menolak ditetapkan 5 (lima) kali dari Harga Pelaksanaan Kreditur INTA dan IT berdasarkan Putusan Pengadilan.

Agenda Ketiga Rapat

Menyetujui perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar terkait perubahan Modal Dasar dan Nilai Nominal Saham.

Agenda Keempat Rapat

Menyetujui atas pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas Perseroan dalam rangka Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada Para Pemegang Saham Perseroan ("PMHMETD"), sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") yang disertai dengan Penerbitan Waran Seri I serta merubah Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan

PN.NIAGA / JKT.PST April 10, 2018 (hereinafter referred to as "CONVERSION") by carrying out Capital Additions without Providing Pre-emptive Rights ("PMTHMETD") based on POJK 38/2014 concerning Public Company Capital Additions without Providing Pre-emptive Rights to PT Intraco Penta Tbk (or "INTA") and PT Inta Trading (or "IT") and 2 (two) rejecting Separatist Creditors, namely PT Bank MNC Internasional Tbk and Sharia Maybank, after the execution of collateral by the Separatist Creditors who have refused this was approved at the EGM on June 5, 2018 with the price of the implementation of INTA and IT amounting to Rp.515 (five hundred and fifteen Rupiah). Whereas the price for the Implementation of Rejecting Separatist Creditors is set at 5 (five) times the Price of INTA and IT Creditors' Implementation based on Court Ruling.

Second Agenda of the Meeting

Approve Affirmation of conversion of debt into ordinary shares of the Company based on and to carry out the decision of the Commercial Court at the Central Jakarta District Court which has been homologized with Case Number 123 / PDT.SUS.PKPU / 2017 / PN.NIAGA / JKT.PST April 10, 2018 (hereinafter referred to as "CONVERSION") by carrying out Capital Additions without Providing Pre-emptive Rights ("PMTHMETD") based on POJK 38/2014 concerning Public Company Capital Additions without Providing Pre-emptive Rights to PT Intraco Penta Tbk (or "INTA") and PT Inta Trading (or "IT") as well as 2 (two) rejecting Separatist Creditors, namely PT Bank MNC Internasional Tbk and Sharia Maybank, after the execution of collateral by the Separatist Creditors who have refused this was approved at the EGM on June 5, 2018 with the price of the implementation of INTA and IT amounting to Rp.515 (five hundred and fifteen Rupiah). Whereas the price for the Implementation of Rejecting Separatist Creditors is set at 5 (five) times the Price of INTA and IT Creditors' Implementation based on Court Ruling.

Third Agenda of the Meeting

Approve changes to Article 4 of the Articles of Association relating to changes in Authorized Capital and Nominal Value of Shares.

Fourth Agenda of the Meeting

Approve the implementation of the Company's Limited Public Offering in the framework of Capital Additions by providing Pre-emptive Rights ("PMHMETD"), in accordance with Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 32 / POJK.04 / 2015 concerning Capital Additions of Public Companies by providing Preemptive Rights ("Rights") accompanied by Issuance of Series I Warrants and amending Article 4 of the Company's Articles of Association

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Selain sebagai organ pengawasan, Dewan Komisaris juga memiliki tanggung jawab dalam hal pemberian saran dan pandangan terkait rencana atau keputusan yang dibuat bagi Perseroan. Secara umum, Dewan Komisaris merupakan salah satu organ penyeimbang agar berjalannya kegiatan usaha sesuai dengan anggaran dasar dan standar yang telah ditetapkan.

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan. Tugas lain Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan adalah memberi nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Landasan hukum keberadaan Dewan Komisaris adalah UUPT dan POJK No. 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik (POJK 33/2014). Penetapan komposisi dan jumlah anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh pemegang saham dalam RUPS, dimana komposisi Dewan Komisaris per tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently Independent Commissioner	Willy Rumondor
Komisaris / Commissioner	Petrus Halim
Komisaris / Commissioner	Erry Sulistio

Pernyataan Independensi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris harus terhindar dari gangguan dan pengaruh atas tindakan dan keputusan Anggota Dewan Komisaris terhadap Perseroan. Untuk itu Dewan Komisaris berkewajiban untuk bertindak profesional, independen, tidak memiliki benturan kepentingan dan bebas dari intervensi pihak manapun. Selain itu antar anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham tidak dibenarkan terjadi transaksi afiliasi dan/ atau memiliki benturan kepentingan dan senantiasa:

1. Beritikad baik, jujur dan profesional;
2. Bertindak untuk kepentingan Perseroan dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya;
3. Mendahulukan kepentingan Perseroan dan/ atau Pemangku Kepentingan lainnya daripada kepentingan pribadi;
4. Mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Perseroan;

BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners carries out the supervisory function of the management policy, the management process in general, both regarding the Company and the Company's businesses, and provides advice to the Board of Directors. Aside from being a supervisory organ, the Board of Commissioners also has responsibility in terms of providing advice and views regarding plans or decisions made for the Company. In general, the Board of Commissioners is one of the balancing organs so that the running of business activities is in accordance with the stipulated statutes and standards.

The Board of Commissioners has the duty to supervise the management policy, the management process in general, both regarding the Company and the Company's businesses. Another task of the Board of Commissioners as a corporate organ is to provide advice to the Board of Directors in the interests of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company. The legal basis for the existence of the Board of Commissioners is the Company Law and POJK No. 33 / POJK.04 / 2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies (POJK 33/2014). The composition and number of members of the Board of Commissioners is determined by the shareholders at the GMS, where the composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2018 is as follows:

Statement of Independence of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners must avoid interference and influence on the actions and decisions of the Board of Commissioners' Members of the Company. For this reason, the Board of Commissioners is obliged to act professionally, independently, has no conflict of interest and is free from the intervention of any party. In addition, among members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and shareholders are not allowed to occur affiliated transactions and / or conflicts of interest and must always:

1. Have good faith, honest and professional;
2. Acting in the interests of the Company and / or other Stakeholders;
3. Prioritize the interests of the Company and / or other Stakeholders rather than personal interests;
4. Make decisions based on an independent and objective assessment for the benefit of the Company;

5. Tidak melakukan transaksi yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan kegiatan Perseroan;
6. Tidak memanfaatkan jabatannya pada Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan;
7. Tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/ POJK.05/2014 Bab VI Pasal 20, Dewan Komisaris Perseroan berkewajiban untuk

- a. Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi;
- b. Mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak;
- c. Menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
- d. Memantau efektifitas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
- e. Memberikan persetujuan dalam hal DPS memerlukan bantuan anggota komite yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris; dan
- f. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Perusahaan, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

Komisaris Independen

Pada tanggal 26 Maret 2018 RUPSLB mengangkat Willy Rumondor sebagai Komisaris Independen menggantikan Dani Firmansjah yang pengunduran dirinya diterima oleh Perseroan melalui RUPSLB tanggal 8 Januari 2018. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 2018, Perseroan menyelenggarakan RUPSLB untuk mengangkat Willy Rumondor sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugasnya sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan serta Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Rincian Rapat Dewan Komisaris pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

5. Not conducting transactions that have Conflict of Interest with the activities of the Company;
6. Not utilizing his/her position with the Company for personal, family and / or other parties' interests which can harm or reduce the Company's profits;
7. Not take and / or receive personal benefits from the Company other than the remuneration and facilities determined based on GMS resolution.

Duties and Authorities of the Board of Commissioner

Referring to Financial Services Authority Regulation No. 30 / POJK.05 / 2014 Chapter VI Article 20, the Board of Commissioners of the Company is obliged to

- a. carry out the supervisory and advisory duties to the Board of Directors;
- b. supervise the Board of Directors in maintaining the balance of interests of all parties;
- c. compile reports on the activities of the Board of Commissioners which are part of the report on the implementation of Good Corporate Governance;
- d. monitor the effectiveness of the implementation of Good Corporate Governance;
- e. give approval in the event that the DPS requires the assistance of members of a committee whose organizational structure is under the Board of Commissioners; and
- f. ensure that the Board of Directors has followed up on audit findings and recommendations from the Company's internal audit unit, external auditors, OJK supervision results and/or the results of supervision by other authorities.

Independent Commissioner

On March 26, 2018 the EGM appointed Willy Rumondor as Independent Commissioner, and then the EGM on August 15, 2018 confirmed his appointment as President Commissioner concurrently Independent Commissioner.

Frequency and Attendance Level of Board of Commissioners Meetings

In carrying out its duties in accordance with the Company's Articles of Association and Financial Services Authority Regulation No. 33 / POJK.04 / 2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners for Issuers or Public Companies, Board of Commissioners' Meetings must be held at least 1 (one) time in 2 (two) months and Combined Meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors at least 1 (one) time in 4 (four) months. The details of the Board of Commissioners' Meetings in 2018 are as follows

No	Nama Name	Jabatan Position	Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners' Meeting		Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors	
			Jumlah	% Kehadiran	Jumlah	% Kehadiran
1	Willy Rumondor*)	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently Independent	5 / 6	083%	5 / 6	083%
2	Petrus Halim	Komisaris Commissioner	6 / 6	100%	6 / 6	100%
3	Erry Sulistio**)	Komisaris Commissioner	2 / 6	33.33%	2 / 6	33.33%

*) Diangkat menjadi Komisaris Independen Perseroan melalui RUPSLB pada tanggal 26 Maret 2018; lulus Fit and Proper Test OJK tanggal 6 April 2018
Appointed as Independent Commissioner of the Company through the EGMS on March 26, 2018; passed the OJK Fit and Proper Test on April 6, 2018

***) Diangkat menjadi Komisaris Perseroan melalui RUPSLB pada tanggal 15 Agustus 2018; lulus Fit and Proper Test OJK tanggal 22 Oktober 2018
Appointed as Commissioner of the Company through the EGM on August 15, 2018; passed the OJK Fit and Proper Test on October 22, 2018

Adapun agenda masing-masing rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi Perseroan dapat dilihat pada tabel berikut:

The agenda of each Board of Commissioners meeting and joint meeting of the Board of Commissioners with the Board of Directors can be seen in the following table:

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
21 Feb 2018	<ul style="list-style-type: none"> Update Laporan Keuangan Januari 2018 / Update of Financial Statements in January 2018 Manajemen Risiko dan tingkat kesehatan keuangan / Risk Management and financial health level Pemenuhan ketentuan regulator / Fulfillment of regulatory requirements
18 April 2018	<ul style="list-style-type: none"> Update Laporan Keuangan Maret 2018 / Update of Financial Statements in March 2018 Update kondisi Perseroan terkait PKPU / Update on the condition of the Company related to PKPU
05 Juni 2018	<ul style="list-style-type: none"> Update Laporan Keuangan Mei 2018 / Financial Report Update May 2018 Proyeksi kondisi keuangan akhir tahun 2018 / Projected financial condition for the end of 2018 Pengelolaan NPF / Management of NPF
28 Agustus 2018	<ul style="list-style-type: none"> Update Laporan Keuangan Juli 2018 / Financial Report Update July 2018 Struktur Organisasi / Organizational structure Kasus terkait hukum / Case related to law
09 November 2018	<ul style="list-style-type: none"> Update Laporan Keuangan September 2018 / Financial Report Update September 2018 Revisi rencana kerja dalam upaya penurunan NPF / Revision of work plans in an effort to reduce NPF Progres pengembalian ijin Unit Usaha Syariah Perseroan / Progress of returning the Company's Sharia Business Unit license
11 Desember 2018	<ul style="list-style-type: none"> Update Laporan Keuangan November 2018 / November 2018 Financial Report Update Rencana Paparan Publik / Public Exposure Plan Progres calon Investor / Prospective Investor Progress

Supervisi dan Rekomendasi Dewan Komisaris di tahun 2018

Sebagai bagian dari tugas supervisinya, Dewan Komisaris secara aktif menyampaikan pandangan kepada Direksi perihal pengelolaan Perseroan. Supervisi dilakukan secara langsung, termasuk dengan memonitor tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan kepada Direksi, baik secara langsung atau melalui komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2018, Dewan Komisaris menggaris bawahi pentingnya perhatian pada aspek-aspek berikut:

1. Upaya memperkuat pengawasan terhadap kualitas piutang pembiayaan Perseroan.
2. Menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Risiko.
3. Optimalisasi sumber daya manusia.
4. Menjaga Tingkat Kesehatan Keuangan Perseroan
5. Upaya memperkuat pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Supervision and Recommendation of the Board of Commissioners in 2018

As part of its supervisory duties, the Board of Commissioners actively expresses its views to the Board of Directors regarding the management of the Company. Supervision is carried out directly, including by monitoring the follow-up of recommendations submitted to the Board of Directors, either directly or through committees established by the Board of Commissioners.

Throughout 2018, the Board of Commissioners underlined the importance of attention to the following aspects:

1. Efforts to strengthen supervision of the quality of the Company's financing receivables.
2. Applying the principles of Risk Management.
3. Optimization of human resources.
4. Maintaining the Company's Financial Soundness
5. Efforts to strengthen the implementation of Good Corporate Governance.

Pelatihan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris selalu melakukan peningkatan kompetensi, seperti diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2013 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama pada Perusahaan Pembiayaan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. Pada tahun 2018 anggota Dewan Komisaris telah mengikuti kegiatan pelatihan dan pengembangan, yaitu:

Training of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners always enhances competence, as stipulated in Financial Services Authority Regulation Number 4 / POJK.05 / 2013 concerning Fit and Proper Tests for the Main Parties in Finance Companies and Financial Services Authority Regulation Number 27 / POJK.03 / 2016 concerning Fit and Proper Tests for the Main Parties of Financial Service Institutions. In 2018 members of the Board of Commissioners have participated in training and development activities, namely:

Nama Name	Jabatan Position	Kegiatan Yang Dilakukan Activities	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Penyelenggara Organizer	Keterangan Information
Willy Rumondor	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently Independent Commissioner	A TO Z MULTIFINANCE BUSINESS (An Overview for F&P Test Preparation) A TO Z MULTIFINANCE BUSINESS (An Overview for F&P Test Preparation)	5-Mar-18	APPI	Peserta
Petrus Halim	Komisaris Commissioner	Seminar Nasional "Peluang dan Tantangan Tahun 2019" (Seminar untuk Direktur, Komisaris, Pemegang Saham Pengendali dan Dewan Pengawas Syariah) National Seminar on "Opportunities and Challenges in 2019" (Seminar for Directors, Commissioners, Controlling Shareholders and Sharia Supervisory Boards)	15-Nov-18	APPI	Peserta
Erry Sulistio	Komisaris Commissioner	Baru diangkat sehingga belum mengikuti pelatihan			

DIREKSI

Direksi merupakan pelaksana dan penanggung jawab atas pengurusan kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Pengurusan ini termasuk menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Direksi juga menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan.

BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors is the executor and the body in charge of managing the interests of the Company in accordance with the purposes and objectives of the Company stipulated in the Articles of Association. This arrangement includes preparing an annual work plan that includes the Company's annual budget to obtain approval from the Board of Commissioners, before the start of the upcoming financial year. The Board of Directors also determines the organizational structure and work procedures of the Company.

Direksi bertanggung jawab secara kolektif, termasuk dalam pengambilan keputusan, serta melaksanakannya sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi di luar yang diputuskan oleh Rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakan dimaksud disetujui oleh rapat Direksi. Selain itu Direksi bertindak mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UUPT dan POJK 33/2014, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS. Penetapan komposisi dan jumlah anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh

The Board of Directors is collectively responsible, including in making decisions, and implementing them in accordance with the division of tasks and authorities. Actions taken by members of the Board of Directors outside of those decided by the Board of Directors' Meetings are the personal responsibility of the person concerned until the action is approved by the Board of Directors' meeting. In addition, the Board of Directors acts on behalf of the Company both inside and outside the court by observing the prevailing laws and regulations, in particular the Company Law and POJK 33/2014, the Articles of Association and GMS Resolutions. The composition and number of members of the Board of

pemegang saham dalam RUPS, dimana komposisi Dewan Komisaris per tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Directors is determined by the shareholders at the GMS, where the composition of the Board of Directors as of December 31, 2018 is as follows:

Direktur Utama (Tidak Terafiliasi) President Director (Unaffiliated)	Carolina Dina Rusdiana
Direktur (Tidak Terafiliasi) Director (Unaffiliated)	Alexander Reyza
Direktur (Tidak Terafiliasi) Director (Unaffiliated)	Kurniawan Saktiaji

Pernyataan Independensi Direksi

Direksi harus terhindar dari gangguan dan pengaruh atas tindakan dan keputusan Anggota Direksi terhadap Perseroan. Untuk itu Dewan Komisaris berkewajiban untuk bertindak profesional, independen, tidak memiliki benturan kepentingan dan bebas dari intervensi pihak manapun. Selain itu antar anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham tidak dibenarkan terjadi transaksi afiliasi dan/atau memiliki benturan kepentingan dan senantiasa:

1. Beritikad baik, jujur dan profesional;
2. Bertindak untuk kepentingan Perseroan dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya;
3. Mendahulukan kepentingan Perseroan dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya daripada kepentingan pribadi;
4. Mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Perseroan;
5. Tidak melakukan transaksi yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan kegiatan Perseroan.
6. Tidak memanfaatkan jabatannya pada Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan.
7. Tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

Tugas dan Wewenang Direksi

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/ POJK.05/2014 Bab V Pasal 12, Direksi Perseroan berkewajiban untuk:

- a. Mematuhi peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan internal lain dari Perusahaan dalam melaksanakan tugasnya;
- b. Mengelola Perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya;
- c. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS;
- d. Memastikan agar Perusahaan memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan Debitur, kreditur, dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya;
- e. Memastikan agar informasi mengenai Perusahaan diberikan kepada Dewan Komisaris dan DPS secara tepat waktu dan lengkap; dan

Statement of Independence of the Board of Directors

The Board of Directors must avoid interference and influence on the actions and decisions of the Board of Directors' Members towards the Company. For this reason, the Board of Directors is obliged to act professionally, independently, has no conflict of interest and is free from the intervention of any party. In addition, among members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and shareholders, are not allowed to occur affiliated transactions and / or conflicts of interest and must always:

1. Have good faith, honest and professional;
2. Acting in the interests of the Company and / or other Stakeholders;
3. Prioritize the interests of the Company and / or other Stakeholders rather than personal interests;
4. Make decisions based on an independent and objective assessment for the benefit of the Company;
5. Not conducting transactions that have Conflict of Interest with the activities of the Company.
6. Not utilizing his/her position with the Company for personal, family and / or other parties' interests which can harm or reduce the Company's profits.
7. Not take and / or receive personal benefits from the Company other than the remuneration and facilities determined based on GMS resolution.

Duties and Authorities of the Board of Directors

Referring to Financial Services Authority Regulation No. 30 / POJK.05 / 2014 Chapter V Article 12, the Board of Directors of the Company is obliged to:

- a. Comply with laws and regulations, articles of association, and other internal regulations of the Company in carrying out its duties;
- b. Manage the Company in accordance with its authority and responsibility;
- c. Responsible for carrying out its duties to the GMS;
- d. Ensure that the Company pays attention to the interests of all parties, especially the interests of the debtors, creditors, and / or other Stakeholders;
- e. Ensure that information about the Company is provided to the Board of Commissioners and DPS in a timely and complete manner; and

f. membantu dan menyediakan fasilitas dan/atau sumber daya untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Organ Perusahaan dan DPS.

f. assist and provide facilities and / or resources for the smooth implementation of the duties and authorities of the Company Organs and the DPS.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Direksi

Rapat Direksi dengan mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Selama tahun 2018, frekuensi rapat dan agenda rapat dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Frequency and Attendance Level of Board of Directors' Meetings

The Board of Directors' meetings with reference to the Company's Articles of Association and Financial Services Authority Regulation Number 33 / POJK.04 / 2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners for Issuers or Public Companies, must be held periodically at least 1 (one) time in each month. During 2018, the Board of Directors held Board of Directors' Meetings with ...% attendance rate, with details as follows:

No	Nama Name	Jabatan Position	Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors	
			Jumlah	% Kehadiran
1	Carolina Dina Rusdiana*)	Direktur Utama President Director	3 / 12	25.00%
2	Alexander Reyza	Direktur Director	12 / 12	100.00%
3	Kurniawan Saktiaji**)	Direktur Director	6 / 12	50.00%
4	Noel Krisnandar Yahja***)	Direktur Director	7 / 12	58.33%

*) Diangkat menjadi Direktur Utama Perseroan melalui RUPSLB pada tanggal 15 Agustus 2018 / Appointed as President Director of the Company through the EGM on August 15, 2018

***) Diangkat menjadi Direktur Perseroan melalui RUPSLB pada tanggal 26 Maret 2018 / Appointed as Director of the Company through the EGM on March 26, 2018

***) Berhenti sebagai Direktur Perseroan melalui RUPSLB pada tanggal 15 Agustus 2018 / Stop as Director of the Company through the EGM on August 15, 2018

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
11 Jan 2018	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Business Plan</i> tahun 2019 / 2019 Business Plan • Rencana penurunan NPF Perseroan / Plans for decreasing NPF of the Company • <i>Legal Action / Hard Collection / Legal Action / Hard Collection</i>
14 Feb 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Kinerja Keuangan bulan Jan 2018 / Financial performance in January 2018 • Terkait kondisi PKPU Perseroan / Update of Company's PKPU conditions • Pemenuhan rasio Perseroan terkait Permodalan / Fulfillment of the Company's ratio related to Capital
15 Mar 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Kinerja Keuangan bulan Feb 2018 / Financial Performance in Feb 2018 • Pembahasan <i>Divisi Compliance</i> terkait pemenuhan OJK / Discussion of the Compliance Division regarding OJK compliance • Kesepakatan homologasi yang akan dicapai Perseroan / Homologation agreement to be achieved by the Company
10 Apr 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Kinerja Keuangan bulan Mar 2018 / Financial Performance in March 2018 • Pembahasan rencana <i>corporate action</i> (PMTHMETD) / Discussion of the corporate action plan (PMTHMETD) • Persiapan RUPS Tahunan Perseroan / Preparation of the Company's Annual GMS
15 Mei 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Kinerja Keuangan bulan Apr 2018 / Financial Performance in April 2018 • Rencana restrukturisasi dengan pihak perbankan / Plan for restructuring with banks • Pembahasan <i>Asset Management</i> Perseroan / Discussion of the Company's Asset Management
01 Jun 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Kinerja Keuangan bulan Mei 2018 / Financial Performance in May 2018 • Pelaksanaan rekomendasi BOC / Implementation of BOC recommendations • <i>Non Performing Financing</i> Perseroan / Non Performing Financing of the Company
24 Jul 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Kinerja Keuangan bulan Juni 2018 / Financial Performance in June 2018 • Pembahasan rencana <i>right issue</i> Perseroan (PMHMETD II) / Discussion of the Company's rights issue plan (PMHMETD II) • Progres <i>Non Performing Financing</i> Perseroan / Progress of the Non Performing Financing of the Company

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
21 Aug 2018	<ul style="list-style-type: none"> Kinerja Keuangan bulan Jul 2018 / Financial Performance in July 2018 Perkenalan Direktur Utama baru dengan <i>all heads</i> / Introduction of the new Managing Director with all Heads Paparan <i>Business Plan</i> 2019 Perseroan kepada Direktur Utama baru / Exposure of the Company's 2019 Business Plan to the new President Director
28 Sep 2018	<ul style="list-style-type: none"> Kinerja Keuangan bulan Aug 2018 / Financial Performance in Aug 2018 Rencana pengembalian ijin usaha Unit Usaha Syariah Perseroan / Plans for returning the Company's Sharia Business Unit license Persiapan revisi Business Plan terkait dengan perbaikan NPF Perseroan / Preparation for revisions to the Business Plan related to the improvement of the NPF of the Company
19 Oct 2018	<ul style="list-style-type: none"> Kinerja Keuangan bulan Sep 2018 / Financial Performance in September 2018 Pencapaian kinerja Perseroan pada Q3 / Achievement of the Company's performance in Q3 Pembahasan Risk Management & Administration Divison / Discussion on Risk Management & Administration Divison
06 Nov 2018	<ul style="list-style-type: none"> Kinerja Keuangan bulan Oct 2018 / Financial Performance in Oct 2018 Rencana penyelenggaraan Pubex 2018 / Plans for organizing Pubex 2018 Dampak dari pengembalian ijin Unit Usaha Syariah / Impact of returning Sharia Business Unit licenses
05 Dec 2018	<ul style="list-style-type: none"> Kinerja Keuangan bulan Nov 2018 / November 2018 Financial Performance Proyeksi laporan keuangan Perseroan pada akhir tahun 2018 / Projections of the Company's financial statements at the end of 2018 Progres perbaikan NPF / Progress in improving NPF

Program Pelatihan Direksi

Direksi selalu melakukan peningkatan kompetensi, seperti diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2013 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama pada Perusahaan Pembiayaan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. Pada tahun 2018 anggota Direksi telah mengikuti kegiatan pelatihan dan pengembangan, yaitu:

Board of Directors Training Program

The Board of Directors always enhances its competence, as stipulated in Financial Services Authority Regulation Number 4 / POJK.05 / 2013 concerning Fit and Proper Tests for the Main Parties in Finance Companies and Financial Services Authority Regulation Number 27 / POJK.03 / 2016 concerning Fit and Proper Tests for the Main Parties of Financial Services Institutions. In 2018 members of the Board of Directors have participated in training and development activities, namely:

Nama Name	Jabatan Position	Kegiatan Yang Dilakukan Activities	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Penyelenggara Organizer	Keterangan Information
Alexander Reyza	Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan Risk Management and Compliance Director	SEMINAR NASIONAL "Industri Pembiayaan di Pasar Modal" NATIONAL SEMINAR "Financing Industry in the Capital Market"	26 Juli 2018	APPI	Peserta Participant
		Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme : " Kebijakan dan prosedur penerapan program APUPPT serta peran dan tanggungjawab pegawai dalam mencegah dan memberantas pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme	27-Nov-18	IBF & PPAK	Peserta
Noel Krisnandar Yahja	Direktur Keuangan Finance Director	SEMINAR NASIONAL : " Perusahaan Pembiayaan di mata Perbankan"	8-May-18	APPI	Peserta
		Seminar pendalaman POJK No. 32/ POJK.04/2015	18-Apr-18	ICSA	Peserta

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Per tanggal 5 November 2018 IBFN telah mengembalikan ijin pembiayaan Syariah dan disetujui oleh OJK dalam suratnya tertanggal 3 Desember 2018.

Dengan demikian, laporan terkait DPS ini berlaku hingga selesainya ijin pembiayaan Syariah di IBFN

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) mensyaratkan Lembaga Keuangan yang mempunyai Unit Usaha/Unit Kerja Syariah (UUS) harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). Tugas utama DPS melakukan pengawasan kegiatan usaha agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Perseroan mengangkat DPS berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham Perseroan No. 33 tanggal 27 Agustus 2014 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dengan susunan sebagai berikut:

Anggota / Member	Prof. Drs. H.M. Nahar Nahrawi, SH
Anggota / Member	H. Rahmat Hidayat, S.E., Ph.D.

Selayaknya organ Perseroan, DPS memiliki independensi yaitu:

1. Beritikad baik, jujur dan profesional
2. Bertindak untuk kepentingan Perseroan dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya
3. Mendahulukan kepentingan Perseroan dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya daripada kepentingan pribadi.
4. Mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Perseroan
5. Tidak melakukan transaksi yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan kegiatan Perseroan.
6. Tidak memanfaatkan jabatannya pada Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan.
7. Tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

Terkait dengan pengembalian ijin Unit Usaha Syariah Perseroan, maka sejak disetujuinya penutupan ijin Usaha Syariah ini pada tanggal 3 Desember 2018, maka masa tugas kedua anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut berakhir.

Tugas dan Kewajiban Dewan Pengawas Syariah

Tugas, wewenang dan tanggung jawab DPS Perseroan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/ POJK.05/2014 Bab VII, yaitu:

- a. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi, yaitu pada rapat reguler antara Direksi dan Dewan Pengawas Syariah yang dilakukan paling sedikit

SHARIA SUPERVISORY BOARD

As of November 5, 2018 IBFN returned its Sharia financing permit which was approved by the OJK in its letter dated December 3, 2018.

As such, this DPS related report applies until the date there is no longer a permit for sharia financing at IBFN.

The National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (MUI DSN) requires Financial Institutions that have Sharia Business Units (UUS) to have a Sharia Supervisory Board (DPS). The main task of DPS is to supervise business activities so as not to deviate from the sharia provisions and principles that have been stated by the DSN. The Company has established the DPS based on the Deed of Agreement with All Shareholders of the Company No. 33 dated 27 August 2014 made before Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta, with the following arrangement:

As with the Company's organs, DPS has independence, namely:

1. Have good faith, honest and professional;
2. Acting in the interests of the Company and / or other Stakeholders;
3. Prioritize the interests of the Company and / or other Stakeholders rather than personal interests;
4. Make decisions based on an independent and objective assessment for the benefit of the Company;
5. Not conducting transactions that have Conflict of Interest with the activities of the Company.
6. Not utilizing his/her position with the Company for personal, family and / or other parties' interests which can harm or reduce the Company's profits.
7. Not take and / or receive personal benefits from the Company other than the remuneration and facilities determined based on GMS resolution.

The tenure of members of the Company's DPS is 5 (five) years from August 27, 2014 to 2019, namely at the closing of the AGM for fiscal year 2018. The appointment of the Company's DPS as mentioned above has been approved by the MUI DSN, and in accordance with applicable laws and regulations .

Duties and Obligations of the Sharia Supervisory Board

The duties, authorities and responsibilities of the Company's DPS refer to Financial Services Authority Regulation No. 30 / POJK.05 / 2014 Article 33, namely:

- a. Provide advice and recommendation to the Board of Directors, namely at regular meetings between the Board of Directors and the Sharia Supervisory

enam kali dalam setahun dan hasil dari rapat Dewan Pengawas Syariah tersebut dituangkan dalam risalah rapat Dewan Pengawas Syariah dan didokumentasikan dengan baik.

- b. Mengawasi penerapan aspek syariah pada kegiatan operasional Unit Usaha Syariah (UUS) Perseroan.
- c. Bertindak sebagai wakil Perseroan (UUS) pada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Board which are conducted at least 6 (six) times a year and the results of the Sharia Supervisory Board meetings are set forth in the minutes of the Sharia Supervisory Board meetings and are properly documented.

- b. Supervise the implementation of sharia aspects in the operational activities of the Sharia Business Unit (UUS) of the Company.
- c. Acting as a representative of the Company (UUS) in the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council.

No	Nama Name	Jabatan Position	Rapat Dewan Pengawas Syariah Sharia Business Unit's Meeting	
			Jumlah Total	% Kehadiran Attendance %
1	Prof. Drs. H.M. Nahar Nahrawi, SH*)	Anggota DPS	0 / 6	00.00%
2	H. Rahmat Hidayat, S.E., Ph.D.	Anggota DPS	6 / 6	100.00%

*) Yang bersangkutan sejak tahun 2016 menderita sakit (stroke) sehingga tidak dapat aktif mengikuti aktivitas perusahaan. / Yang bersangkutan sejak tahun 2016 menderita sakit (stroke) sehingga tidak dapat aktif mengikuti aktivitas perusahaan.

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
22 Feb 18	<ul style="list-style-type: none"> • Kinerja Keuangan bulan Jan 2018 / Financial performance in January 2018 • Update kondisi PKPU Perseroan / Update on PKPU Company conditions
2 May 18	<ul style="list-style-type: none"> • Kinerja Keuangan bulan Mar 2018 / Financial Performance in March 2018 • Pemenuhan rasio-rasio terkait permodalan UUS / Fulfillment of ratios related to UUS capital
31 May 18	<ul style="list-style-type: none"> • Kinerja Keuangan bulan Mei 2018 / Financial Performance in May 2018 • Siraman rohani di Bulan Ramadhan / Spiritual event in the month of Ramadan

Unit Usaha Syariah

Perseroan memiliki Unit Usaha Syariah sejak tahun 2010 sesuai dengan Akta Pendirian No. 22 tanggal 20 April 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Nelson Eddy Tambubolon, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan penetapan dari Dewan Majelis Ulama Indonesia No. U-158/DSN-MUI/V/2010 tanggal 29 Mei 2010. Saat ini Kepala Unit Usaha Syariah Perseroan dijabat oleh Yunita Rivianti Riyadi yang diangkat berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor 186/IBF/HRGA-SK/X/12 tertanggal 1 Oktober 2012.

Untuk menyusun aktivitas yang lebih terarah, Perseroan memutuskan untuk mengembalikan ijin Unit Usaha Syariah Perseroan dan hal ini telah disetujui sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No: KEP-166/NB.223/2018 tanggal 3 Desember 2018.

Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Unit Usaha Syariah PT Intan Baruprana Finance Tbk:

1. Melakukan pengelolaan dan pengurusan unit usaha syariah yang sesuai dengan prinsip syariah, prinsip kehati-hatian dan ketentuan yang dikeluarkan oleh regulator serta peraturan perundang-undangan.

Sharia Business Unit

The Company has a Sharia Business Unit since 2010 in accordance with Deed of Establishment No. 22 dated April 20, 2010 made before Nelson Eddy Tambubolon, SH, Notary Public in Jakarta, who had obtained stipulation from the Indonesian Council of Ulama Council No. U-158 / DSN-MUI / V / 2010 dated 29 May 2010. Currently the Company's Sharia Business Unit is chaired by Yunita Rivianti Riyadi who is appointed based on Appointment Letter Number 186 / IBF / HRGA-SK / X / 12 dated October 1, 2012.

To develop a more directed activity, the Company has decided to return the Company's Sharia Business Unit permit and this has been approved in accordance with the Decree of the OJK Board of Commissioners No: KEP-166 / NB.223 / 2018 dated December 3, 2018.

Duties and Responsibilities of PT Intan Baruprana Finance Tbk Head of Sharia Business Unit:

1. Perform management and administration of the sharia business unit in accordance with sharia principles, prudential principles and provisions issued by regulators as well as the laws and regulations.

2. Memastikan bahwa pembiayaan yang dilakukan secara syariah telah memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan secara syariah dan telah diterapkan pada seluruh jenjang organisasi.
3. Menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah, pihak berwenang, Audit Internal maupun Eksternal.

Beberapa hasil keputusan Rapat DPS selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Perseroan berupaya untuk mencapai Homologasi dengan seluruh kreditur Perseroan
2. Menyetujui untuk pengembalian ijin Unit Usaha Syariah Perseroan bilamana itu yang terbaik untuk kesinambungan hidup Perseroan
3. Memenuhi kewajiban keseluruhan kreditur Syariah sesuai dengan perjanjian homologasi
4. Memperbaiki Non Performing Financing untuk debitur-debitur syariah dengan cara restrukturisasi, reaktivasi maupun novasi.
5. Comply documentation dan memenuhi semua persyaratan OJK bilamana pengembalian ijin Unit Usaha Syariah disetujui Otoritas Jasa Keuangan.

Unit Usaha Syariah Perseroan selama tahun 2018 tidak melakukan kerja sama dengan konsultan atau penasihat manapun dan tidak ada permasalahan hukum, baik pidana maupun perdata. Selain itu tidak ditemukan adanya kecurangan/penyimpangan internal maupun pelanggaran kepatuhan syariah sepanjang tahun 2018.

Independensi DPS Perseroan terjaga dengan tidak adanya rangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada perusahaan pembiayaan yang sama dan juga tidak rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lainnya.

Pelatihan Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah selalu melakukan peningkatan kompetensi, dimana pada tahun 2018 anggota Dewan Pengawas Syariah telah mengikuti kegiatan pelatihan dan pengembangan, yaitu:

2. Ensure that sharia financing carried out complies with sharia corporate governance principles and has been implemented at all levels of the organization.
3. Follow up on every recommendation given by the Sharia Supervisory Board, the authorities, Internal Audit and External Audit.

Some of the decisions of the DPS Meetings during 2018 are as follows:

1. The Company seeks to achieve Homologation with all of the Company's creditors
2. To approve the return of the Company's Sharia Business Unit license providing it is the best for the sustainability of the Company's life
3. Fulfill obligations throughout Sharia creditors in accordance with homologation agreements
4. Improve Non Performing Financing for Islamic debtors by restructuring, reactivating and novating.
5. Comply documentation and fulfill all OJK requirements should the return of Sharia Business Unit license is approved by the Financial Services Authority.

The Company's Sharia Business Unit during 2018 did not cooperate with any consultant or advisor and there were no legal issues, both criminal and civil. In addition, there were no internal frauds or violations of sharia compliance throughout 2018.

The independence of the Company's DPS is successfully maintained by the absence of multiple positions as members of the Board of Directors or Board of Commissioners in the same finance company and there is also no dual position as members of the Board of Directors, Board of Commissioners or DPS in more than 4 (four) other sharia financial institutions.

Training of Sharia Supervisory Board

The Sharia Supervisory Board always improves its competence, where in 2018 members of the Sharia Supervisory Board have participated in training and development activities, namely:

Nama Name	Jabatan Position	Kegiatan Yang Dilakukan Activities	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Penyelenggara Organizer	Keterangan Description
Dr. H. Rahmat Hidayat, SE, MT	Anggota Dewan Pengawas Syariah	6th Southeast Asia International Islamic Philanthropy Conference	24 sampai dengan 26 April 2018	Univeristas Islam Indonesia, IMZ, dan UITM Melaka Malaysia	Pembicara Presenter
		Workshop Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS LKS Se-Indonesia Tahun 2018	8 sampai dengan 9 November 2018	Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia	Peserta Participant
Prof. Drs. H.M. Nahar Nahrawi, SH*)	Anggota Dewan Pengawas Syariah	-	-	-	-

*] Yang bersangkutan sejak tahun 2016 menderita sakit (stroke) sehingga tidak dapat aktif mengikuti aktivitas perusahaan. / The person concerned since 2016 suffered a stroke so that he could not actively participate in company activities.

KOMITE AUDIT

Komite Audit merupakan salah satu komite yang mendukung pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris. Pembentukan Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015, dengan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Intan Baruprana Finance Tbk No. 007/SKEP-DEKOM/IBF/0418 tanggal 10 April 2018, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua / Chairman	Willy Rumondor
Anggota / Member	Henry Reinold Ranonto
Anggota / Member	Herman Kurnadi

Profil singkat masing-masing anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Willy Rumondor – Ketua

Profil Willy Rumondor dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris Perseroan.

2. Henry Reinold Ranonto – Anggota

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta, lahir tahun 1976. Diangkat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak tanggal 8 September 2014. Menyelesaikan pendidikan dengan gelar Magister Management Concentration Finance dari Universitas Katolik Atma Jaya pada tahun 2006.

Selain menjadi Komite Audit Perseroan, beliau juga merupakan Managing Director PT Lestari Kirana Persada. Beberapa jabatan lain yang pernah diemban antara lain Finance & Accounting Head (Senior Manager) at PT Sigma Energy Compressindo antara tahun 2010 – 2015 dan Finance Controller di PT Duta Sirion Internasional antara tahun 2009 – 2010.

3. Herman Kurnadi – Anggota

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta, lahir tahun 1975. Diangkat menjadi anggota Komite Audit Perseroan pada tanggal 05 Juli 2017 melalui surat penetapan no: 031/IBF/CPL-SK/MII/17. Beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana Accounting dari Universitas Trisakti pada tahun 1998 dan menyelesaikan studi S2 jurusan financial management dari Universitas Pelita Harapan pada tahun 2003.

Beliau memiliki pengalaman kerja pada akuntan publik dan lembaga keuangan, antara lain Head of Risk Digital Banking (Jenius) pada Bank Tabungan dan Pensiunan Nasional (BTPN) antara tahun 2012 – 2017, Head of Corporate Internal Audit PT Smart Tbk (member of Sinar Mas Group) antara tahun 2010 – 2012, VP/Head of Audit PT Great Eastern Life Insurance pada tahun 2009, AVP/Deputy Head Internal Audit Mizuho Bank – Indonesia antara tahun 2006 – 2009, Internal Auditor Bank BCA antara tahun 2000 – 2005, serta Public Accounting Firm Drs. R.B. Tanubrata and Co. antara tahun 1999-2000.

AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee is one of the committees that supports the implementation of the duties of the Board of Commissioners. The establishment of the Company's Audit Committee is in accordance with OJK Regulation No. 55 / POJK.04 / 2015, based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Intan Baruprana Finance Tbk No. 007/SKEP-DEKOM/IBF/0418, April , 10, 2018, with the following arrangement:

The brief profile of each member of the Audit Committee is as follows:

1. Willy Rumondor - Chairman

Willy Rumondor's profile can be seen in the Profile section of the Company's Board of Commissioners.

2. Henry Reinold Ranonto - Member

Indonesian citizen, born in 1976. Appointed as a Member of the Company's Audit Committee since September 8, 2014. He completed his education with a Master Degree in Management Concentration Finance from Atma Jaya Catholic University in 2006.

In addition to being the Company's Audit Committee member, he is also the Managing Director of PT Lestari Kirana Persada. Several other positions that have been held include Finance & Accounting Head (Senior Manager) at PT Sigma Energy Compressindo between 2010 - 2015 and Finance Controller at PT Duta Sirion Internasional between 2009 - 2010.

3. Herman Kurnadi - Member

An Indonesian citizen, born in 1975. Appointed as a member of the Internal Audit Committee on July 5, 2017 through stipulation letter no: 031 / IBF / CPL-SK / VII / 17. He completed his Bachelor in Accounting from Trisakti University in 1998 and his master's degree in Financial Management from Pelita Harapan University in 2003.

He has work experience in public accountants and financial institutions, including as Head of Risk Digital Banking (Jenius) at the National Savings and Pension Bank (BTPN) between 2012 - 2017, Head of Corporate Internal Audit PT Smart Tbk (member of Sinar Mas Group) between 2010 - 2012, VP / Head of Audit of PT Great Eastern Life Insurance in 2009, AVP / Mizuho Bank - Indonesia Deputy Head of Internal Audit between 2006 - 2009, BCA Bank Internal Auditor between 2000 - 2005, and Public Accounting Firm Drs. R.B. Tanubrata and Co. between 1999-2000.

Tugas utama Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dengan memberikan masukan dan usulan atas laporan-laporan dari Direksi, serta memberi masukan atas hal-hal yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris. Rincian tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada Publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit melaksanakan Rapat dengan ketentuan:

1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
2. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota;
3. Keputusan Rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal setelah dilakukannya musyawarah mufakat tidak juga dapat mengambil keputusan, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
4. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit dari Komisaris Independen lainnya apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir. Apabila seluruh Komisaris Independen yang menjadi Komite Audit berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh salah satu anggota Komite Audit yang hadir.
5. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinions), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada setiap anggota Komite Audit, anggota Dewan Komisaris, dan Perusahaan.

The main duties of the Audit Committee are to assist the Board of Commissioners by providing input and proposals of reports from the Board of Directors, as well as providing input on matters that need the attention of the Board of Commissioners. The details of the duties and responsibilities of the Audit Committee are as follows:

- a. Reviewing financial information that will be released by the Company to the Public and / or the authorities including financial statements, projections and other reports related to the Company's financial information;
- b. Reviewing compliance with laws and regulations relating to the Company's activities;
- c. Provide independent opinions in the event of disagreements between management and the Accountant on the services they provide;
- d. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of Public Accountants based on independence, the scope of the assignment, and fees;
- e. Reviewing the implementation of audits by internal auditors and supervising the implementation of follow-up actions by the Board of Directors on the findings of internal auditors;
- f. Reviewing risk management activities carried out by the Board of Directors, if the Company does not have a risk monitoring function under the Board of Commissioners;
- g. Review complaints related to the accounting process and financial reporting of the Company;
- h. Review and provide advice to the Board of Commissioners regarding potential conflicts of interest of the Company; and
- i. Maintain the confidentiality of the Company's documents, data and information.

In carrying out its duties, the Audit Committee holds Meetings with the following provisions:

1. The Audit Committee holds regular meetings at least 1 (one) time in 3 (three) months;
2. The Audit Committee's meeting can only be held if attended by more than 1/2 (one-half) of the total number of members;
3. Decisions of Committee Meetings are taken based on deliberations to reach consensus. In the event that after deliberations to reach consensus a decision can still not be made, then the decision will be made based on majority vote;
4. Can be chaired by the Chairman of the Audit Committee or a member of the Audit Committee from other Independent Commissioners if the Chairman of the Audit Committee is unable to attend. If all Independent Commissioners who belong to the Audit Committee are unable to attend, the meeting will be chaired by one of the Audit Committee members present.
5. Each Audit Committee meeting is contained in the minutes of the meeting, including if there are dissenting opinions, which is signed by all members of the Audit Committee present and submitted to each member of the Audit Committee, members of the Board of Commissioners, and the Company.

Pada tahun 2018, Komite Audit telah melaksanakan rapat dengan agenda masing-masing rapat seperti tabel dibawah ini:

In 2018, the Audit Committee held meetings with Audit Committee are presented following table:

No	Nama Name	Jabatan Position	Rapat Komite Audit Meeting of Audit Committee	
			Jumlah	% Kehadiran
1	Willy Rumondor	Ketua Komite Audit	3 / 4	75.00%
2	Henry R. Ranonto	Anggota Komite Audit	4 / 4	100.00%
3	Herman Kurnadi	Anggota Komite Audit	4 / 4	100.00%

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
9-Jan-18	<ul style="list-style-type: none"> Update dari Internal Audit Perseroan / Updates from the Company's Internal Audit Program kerja Komite Audit 2018 / Audit Committee 2018 work program
16-May-18	<ul style="list-style-type: none"> Penyampaian program audit Q2-2018 / Submission of audit programs Q2-2018 Perkenalan Komisaris Independen / Introduction of Independent Commissioner
19-Jul-18	<ul style="list-style-type: none"> Progres Internal Audit / Internal Audit Progress Update Kondisi Perseroan / Update on the Company's Conditions
6-Dec-18	<ul style="list-style-type: none"> Progres Kerja Audit 2018 / Audit Work Progress 2018 Rencana Kerja 2019 / 2019 Work Plan

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014. Melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 007/SKEP-DEKOM/IBF/0418 tanggal 10 April 2018, susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sebagai berikut:

Ketua / Chairman	Willy Rumondor
Anggota / Members	Petrus Halim
Anggota / Members	Mohammad Quidzie

Profil singkat masing-masing anggota Komite Nominasi & Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Willy Rumondor – Ketua

Profil Willy Rumondor dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris Perseroan.

2. Petrus Halim - Anggota

Profil Petrus Halim dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris Perseroan.

3. Mohammad Quidzie - Anggota

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta, lahir tahun 1968. Diangkat menjadi anggota Komite Nominasi & Remunerasi Perseroan sejak 23 Maret 2018 melalui surat keputusan Dewan Komisaris no: 005/SKEP-DEKOM/IBF/0318. Menyelesaikan pendidikan Sarjana dari Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada pada tahun 1994.

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

The Company has formed a Nomination and Remuneration Committee in accordance with OJK Regulation No. 34 / POJK.04 / 2014. Through Board of Commissioners Decree No. 007/SKEP-DEKOM/IBF/0418, April 2018, the composition of the Company's Nomination and Remuneration Committee members is as follows:

The brief profile of each member of the Nomination & Remuneration Committee is as follows:

1. Willy Rumondor - Chairman

Willy Rumondor's profile can be seen in the Profile section of the Company's Board of Commissioners.

2. Petrus Halim - Member

Petrus Halim's profile can be seen in the Profile section of the Company's Board of Commissioners.

3. Mohammad Quidzie - Member

Indonesian citizen, domiciled in Jakarta, born in 1968. Appointed as a member of the Company's Nomination & Remuneration Committee since March 23, 2018 through a decision letter from the Board of Commissioners no: 005 / SKEP-DEKOM / IBF / 0318. He completed his Bachelor of Education from the Faculty of Psychology at Gajah Mada University in 1994.

Memulai karir ditahun 1994 di PT United Tractors Indonesia sebagai Corporate Human Resource Management. Bergabung dengan PT Arsa Raya Perdana sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2000 sebagai Human Resources System Development. Mulai tahun 2000 sampai dengan saat ini bergabung dengan PT Intraco Penta Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Senior Vice President Human Energy.

Started his career in 1994 at PT United Tractors Indonesia as a Corporate Human Resource Management. Joined PT Arsa Raya Perdana from 1998 to 2000 as a Human Resources System Development. Starting from 2000 until now he joined PT Intraco Penta Tbk with his last position as Senior Vice President of Human Energy.

Dalam melaksanakan tugasnya, selama tahun 2018 Komite Nominasi dan Remunerasi melaksanakan Rapat dengan agenda rapat sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

In carrying out its duties, during 2018 the Nomination and Remuneration Committee carries out Meetings with the meeting agenda as listed in the table below:

No	Nama Name	Jabatan Position	Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee	
			Jumlah	% Kehadiran
1	Willy Rumondor	Ketua KNR	3 / 3	25.00%
2	Petrus Halim	Anggota KNR	3 / 3	100.00%
3	Quidzie Okky	Anggota KNR	3 / 3	100.00%

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
10 Apr 18	<ul style="list-style-type: none"> Susunan anggota Komite KNR / The composition of the KNR Committee members Keputusan pemilihan Direktur dan Komisaris Independen Perseroan / Decision on the selection of Directors and Independent Commissioners of the Company
5 Jun 18	<ul style="list-style-type: none"> Seleksi calon Direktur Utama Perseroan / Selection of candidates for the President Director of the Company
10 Aug 18	<ul style="list-style-type: none"> Pemberhentian dengan hormat Noel K. Yahja - Direksi Perseroan / Noel K. Yahja - Board of Directors of the Company

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Besaran remunerasi yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan dalam RUPS. Kriteria penetapan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

1. Pencapaian kinerja keuangan Perseroan, termasuk terhadap kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban keuangannya;
2. Kondisi perekonomian dan perbandingan terhadap perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sejenis;
3. Kontribusi dan kinerja dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Perseroan.

Paket remunerasi yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2018 sebesar Rp 410.000.000 dan Rp 3.143.691.780, sementara untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp1.164.500.000 dan Rp 2.153.500.000

Board of Commissioners and Board of Directors' Remuneration

The amount of remuneration received by the Board of Commissioners and Board of Directors is determined based on GMS resolution. The criteria for determining the remuneration of members of the Board of Commissioners and Board of Directors are as follows:

1. Have achieved the Company's financial performance, including the Company's ability to fulfill its financial obligations;
2. Economic conditions and comparisons of companies that have similar business activities;
3. Contributions and performance of each member of the Board of Directors and Board of Commissioners for the Company.

The remuneration packages received by the Board of Commissioners and Board of Directors in 2018 amounted to Rp 410.000.000 and Rp 3.143.691.780, while those for the years ended December 31, 2017 amounted to Rp1,164,500,000 and Rp2,153,500,000

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan merupakan satuan kerja yang wajib dimiliki setiap perusahaan publik sesuai ketentuan dalam POJK Nomor 35/ POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik (POJK 35/2014). Sekretaris Perusahaan adalah Alexander Reyza sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 003/SKEP-DIR/IBF/0818 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan Perseroan tertanggal 20 Agustus 2018, menggantikan Noel Krisnandar Yahja. Beliau juga merupakan Direktur Perseroan, sehingga profil Sekretaris Perusahaan dapat merujuk pada profil Direksi pada halaman 31.



CORPORATE SECRETARY

The Corporate Secretary is a work unit that must be owned by every public company in accordance with the provisions of POJK Number 35 / POJK.04 / 2014 concerning Corporate Secretary of Issuers or Public Companies (POJK 35/2014). The holder of the Corporate Secretary of the Company is Alexander Reyza, as Corporate Secretary in accordance with Decree of the Company's Board of Directors No. 003 / SKEP-DIR / IBF / 0818 concerning Appointment of the Company's Corporate Secretary dated August 20, 2018, replacing Noel Krisnandar Yahja. He is also a Director of the Company, so that the Corporate Secretary profile can refer to the Board of Directors profile on page 31.

Sekretaris Perusahaan memiliki tugas antara lain:

1. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan lembaga regulator pasar modal yakni OJK serta Bursa Efek Indonesia;
2. Sebagai pusat informasi bagi para pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan yang memerlukan informasi-informasi penting yang berkaitan dengan kegiatan dan perkembangan Perseroan;
3. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan agar tindakan korporasi yang dilakukan Direksi maupu transaksi yang dilakukan oleh korporasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal, anggaran dasar Perseroan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
4. Melaksanakan penyelenggaraan RUPS Perseroan, Rapat Direksi dan Rapat Komisaris dan melakukan penelaahan dari aspek legal atas dokumen transaksi Perseroan.

The Corporate Secretary has duties including:

- 1 As a liaison between the Company and capital market regulator institutions namely OJK and the Indonesia Stock Exchange;
2. As an information center for shareholders and all stakeholders who need important information relating to the activities and developments of the Company;
3. Provide input to the Board of Directors of the Company so that corporate actions taken by the Board of Directors can be carried out by the Company in accordance with applicable laws and regulations in the capital market, the Company's articles of association and applicable laws and regulations of the Republic of Indonesia;
4. Carry out the Company's GMS, Board of Directors and Board of Commissioners' Meetings and conduct legal review of the Company's transaction documents.

AUDIT INTERNAL

Unit Audit Internal merupakan satuan kerja yang menjalankan fungsi audit internal dan wajib dimiliki setiap perusahaan publik sesuai ketentuan dalam POJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Untuk itu Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal melalui Surat Penetapan Direksi No. 001/IBF/HRGA-SPNP/II/17 tanggal 3 Pebruari 2017. Hafiz Dwi Sayadi ditunjuk sebagai Internal Audit Perseroan yang langsung bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Hafiz Dwi Sayadi

Warga negara Indonesia, berdomisili di Jakarta, Lahir tahun 1988. Menyelesaikan pendidikan dengan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Muhammadiyah pada tahun 2010.

INTERNAL AUDIT

Internal Audit Unit is a work unit that carries out the internal audit function and must be owned by every public company in accordance with the provisions of POJK No. 56 / POJK.04 / 2015 dated 23 December 2015 concerning the Establishment and Guidelines for Preparation of the Internal Audit Unit Charter. For this reason, the Company has formed an Internal Audit Unit through Decree of the Board of Directors No. 001 / IBF / HRGA-SPNP / II / 17 dated February 3, 2017. Hafiz Dwi Sayadi has been appointed as Internal Audit Head and he is directly responsible to the President Director.

Hafiz Dwi Sayadi

An Indonesian citizen, domiciled in Jakarta, Born in 1988. Completed his education with a Bachelor of Economics degree from Muhammadiyah University in 2010.

Berkarir sebagai auditor sejak tahun 2010 di KAP Maksum, Suyamto, Hirdjan & Rekan sampai tahun 2011. Kemudian bergabung dengan PT EK. Prima Ekspor Indonesia sejak awal 2011 sampai dengan tahun 2013 dengan posisi sebagai Internal Audit. Kemudian bergabung dengan PT Madu Murni Nusantara sampai tahun 2014 dan ke KAP Indra, Sumijono & Rekan sebagai Senior Auditor. Sebelum bergabung ke Perseroan, menjadi Senior Auditor di InewsTV dari tahun 2015.

Internal Audit Perseroan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan Dewan Komisaris;
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. Bekerja sama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Internal Audit mengacu kepada Piagam Audit, sesuai diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no 56/POJK.04/2014, yang didalamnya memuat:

1. Struktur dan kedudukan Unit Audit Internal;
2. Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal;
3. Wewenang Unit Audit Internal;
4. Kode etik Unit Audit Internal yang mengacu pada kode etik yang ditetapkan oleh asosiasi Audit Internal yang ada di Indonesia atau kode etik Audit Internal yang lazim berlaku secara internasional;
5. Persyaratan auditor internal dalam Unit Audit Internal;
6. Pertanggungjawaban Unit Audit Internal; dan
7. Larangan perangkap tugas dan jabatan auditor internal dan pelaksana dalam Unit Audit Internal dari pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan baik di Emiten atau Perusahaan Publik maupun anak perusahaannya.

Realisasi Kegiatan Internal Audit

Pada tahun 2018 Internal Audit telah melakukan kontrol atas transaksi operasional Perseroan pada tahun, termasuk proses restrukturisasi keuangan sebagai amanat Perjanjian Perdamaian antara Perseroan dengan para kreditor. Atas kontrol tersebut

He started his career as an auditor since 2010 at KAP Maksum, Suyamto, Hirdjan & Rekan until 2011. Then he joined PT EK. Prima Export Indonesia since the beginning of 2011 until 2013 with a position as Internal Audit. Then joined PT Madu Murni Nusantara until 2014 and to KAP Indra, Sumijono & Partners as Senior Auditors. Before joining the Company, he became a Senior Auditor on InewsTV from 2015.

The Company's Internal Audit has the following duties and responsibilities:

1. Arrange and implement the annual Internal Audit plan;
2. Test and evaluate the implementation of internal controls and risk management systems in accordance with the policy of the company;
3. Conducting checks and evaluations on efficiency and effectiveness in the fields of finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology, and other activities;
4. Provide suggestions for improvement and objective information about the activities examined at all levels of management;
5. Prepare an audit report and submit the report to the President Director and the Board of Commissioners;
6. Monitor, analyze and report on the implementation of suggested improvements;
7. Cooperate with the Audit Committee;
8. Arrange a program to evaluate the quality of internal audit activities that it does; and
9. Conduct special checks if needed.

In carrying out its duties and responsibilities Internal Audit refers to the Internal Audit Charter, as stipulated in Financial Services Authority Regulation no 56 / POJK.04 / 2014, which includes:

1. Structure and position of the Internal Audit Unit;
2. Internal Audit Unit duties and responsibilities;
3. Authority of the Internal Audit Unit;
4. Code of ethics of the Internal Audit Unit which refers to the code of ethics established by the existing Internal Audit association in Indonesia or the Internal Audit code of ethics which is commonly applicable internationally;
5. Requirements for internal auditors in the Internal Audit Unit;
6. Internal Audit Unit Responsibilities; and
7. Prohibition of concurrent duties and positions of internal and implementing auditors in the Internal Audit Unit from the implementation of company operations, both at Issuers or Public Companies and their subsidiaries.

Realization of Internal Audit Activities

In 2018 Internal Audit has exercised controls over the Company's operational transactions in the year, including the financial restructuring process as mandated by the Peace Agreement between the Company and its creditors. For these controls, Internal

Internal Audit telah memberikan rekomendasi atas review yang harus dilakukan terkait prosedur operasional Perseroan sehingga ke depannya dapat lebih meningkatkan kepuasan kepada pelanggan atas fasilitas yang diberikan.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Perseroan memastikan seluruh aktivitas keuangan dan operasional dikendalikan secara tepat, dimana:

1. Dalam aspek pengendalian keuangan, Perseroan memastikan agar kegiatan usaha Perseroan dicatat sesuai dengan prinsip akuntansi dan standar akuntansi yang berlaku sehingga laporan keuangan Perseroan dapat dipercaya.
2. Dalam aspek pengendalian operasional, Perseroan memastikan bahwa struktur organisasi telah dibuat sedemikian rupa sehingga terdapat pemisahan tugas dan tanggung jawab yang tegas seperti:
 - a. Perseroan menerapkan aspek three lines of defense, di mana lini pertama adalah manajemen operasional, lini ke dua adalah risk management dan fungsi kepatuhan, lini ke tiga adalah audit internal.
 - b. Perseroan menerapkan sistem pengendalian batas persetujuan pembiayaan sesuai dengan jenjang kewenangan komite pembiayaan, mulai dari kewenangan yang diberikan kepada Head Department sampai dengan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
 - c. Perseroan secara tegas menerapkan sistem dual control dengan prinsip kehati-hatian untuk meminimalisasi risiko kecurangan proses operasional perusahaan dalam satu departemen maupun lintas departemen.

Perseroan akan lebih meningkatkan intensitas program audit untuk mencegah terjadinya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan internal Perseroan dan regulasi yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan. Internal Audit akan memeriksa pemenuhan seluruh syarat komite audit baik melalui program pemeriksaan reguler maupun pemeriksaan secara tiba-tiba (sidak). Divisi manajemen risiko dan Internal Audit Perseroan akan membuat laporan dan memastikan bahwa pelaksanaan manajemen risiko yang sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan telah dijalankan dan diterapkan disetiap divisi Perseroan.

Hal-hal yang telah menjadi kekuatan Perseroan dalam proses pengendalian di atas adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan Pengendalian adalah dasar atas komponen pengendalian internal lainnya yang membentuk budaya dan perilaku manusia atas pentingnya kesadaran pengendalian. Perseroan menerapkan Lingkungan Pengendalian yang efektif di mana semua karyawan mengerti mengenai tugas dan tanggung jawab mereka, batas kewenangan mereka, mempunyai pengetahuan yang memadai, dan mengerti serta berkomitmen untuk melakukan aktivitas yang benar dengan cara yang benar.

Audit has provided recommendations for reviews that must be carried out related to the Company's operational procedures so that in future it can further increase customer satisfaction with the facilities provided.

INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Company ensures that all financial and operational activities are controlled appropriately, where:

1. In the aspect of financial controls, the Company ensures that the Company's business activities are recorded in accordance with applicable accounting principles and accounting standards so that the Company's financial statements can be trusted.
2. In the aspect of operational controls, the Company ensures that the organizational structure has been made in such a way that there is a strict separation of duties and responsibilities such as:
 - a. The Company applies the three lines of defense aspect, where the first line is operational management, the second line is risk management and the compliance function, and the third line is internal audit.
 - b. The Company applies a system of financing approval limits in accordance with the level of authority of the financing committee, starting from the authority given to the Head of Department to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.
 - c. The Company explicitly applies a dual control system based on prudential principles to minimize the risk of fraudulent operations in the Company in one department or across departments.

The Company will further increase the intensity of the audit program to prevent things that deviate from the Company's internal provisions and regulations set by the Financial Services Authority. Internal Audit will check the fulfillment of all audit committee requirements both through regular inspection programs and sudden checks (inspections). The Risk Management and Internal Audit Divisions of the Company will make a report and ensure that the implementation of risk management in accordance with the Financial Services Authority Regulations has been implemented and applied in each division of the Company.

Matters that have become the Company's strength in the above control process are as follows:

1. Control Environment

The Control Environment is the basis of other internal control components that shape human culture and behavior on the importance of control awareness. The Company implements an effective Control Environment where all employees understand their duties and responsibilities, limits their authority, have adequate knowledge, and understanding and are committed to doing the right activities in the right way.

2. Penilaian Risiko

Perseroan senantiasa mengidentifikasi dan menganalisa risiko-risiko dalam mencapai sasaran usaha yang ditetapkan. Perseroan telah melakukan identifikasi atas risiko-risiko yang mengacu pada 7 (tujuh) risiko yang tercantum dalam Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan dan melakukan penilaian risiko (self assesment) secara berkelanjutan untuk mengukur tingkat risiko yang dihadapi Perseroan, di mana hasil serta rekomendasi untuk dilakukannya perbaikan disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

3. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian merupakan penerapan prinsip-prinsip dan teknik-teknik pengendalian internal yang dituangkan dalam kebijakan, prosedur dan penetapan batas kewenangan untuk memitigasi risiko yang telah diidentifikasi dan diukur. Setiap kebijakan dan prosedur didokumentasikan, dipelihara dan dikinikan secara berkala dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan bisnis Perseroan.

4. Informasi dan Komunikasi

Perseroan telah membuat sistem informasi dan komunikasi yang baik dalam bentuk *communication tree* sehingga setiap karyawan Perseroan selalu terhubung untuk mendapatkan setiap informasi yang terpercaya dan tepat waktu.

5. Pemantauan

Manajemen Perseroan melakukan penilaian berkelanjutan dan berkala terhadap kualitas kinerja pengendalian internal untuk menentukan apakah pengendalian telah beroperasi sebagaimana diharapkan dan dimodifikasi melalui Divisi Audit Internal. Kekurangan yang signifikan dan kelemahan material selalu dikomunikasikan kepada Komite Audit sebagai bagian dari setiap pemeriksaan.

6. Evaluasi atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Dalam mendukung efektivitas pengendalian internal di Perseroan, Divisi Internal Audit berkoordinasi dengan Komite Audit untuk memastikan bahwa fungsi pengendalian internal dan manajemen risiko telah diterapkan pada semua aspek dan lini Perseroan. Perseroan senantiasa memastikan terpenuhinya Peraturan OJK sebagai wujud tanggung jawab Perseroan untuk selalu tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan Konvensional dan Syariah yang disampaikan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia sepanjang tahun 2018 adalah sebagai berikut:

2. Risk Assessment

The Company always identifies and analyzes risks in achieving the stated business objectives. The Company has identified risks that refer to 7 (seven) risks listed in the Company's Risk Management Implementation Guidelines and conducts continuous self-assessments to measure the level of risk faced by the Company, where the results and recommendations for improvements are submitted to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

3. Control Activities

Control activities are the application of principles and techniques of internal controls as outlined in policies, procedures and determination of authority limits to mitigate risks that have been identified and measured. Every policy and procedure is documented, maintained and updated periodically by considering changes in the Company's business environment.

4. Information and Communication

The Company has established a good information and communication system in the form of a communication tree so that every employee of the Company is always connected to get any reliable and timely information.

5. Monitoring

The Company's management conducts continuous and periodic assessments of the quality of performance of internal controls to determine whether the controls are operating as expected and modified through the Internal Audit Division. Significant shortcomings and material weaknesses are always communicated to the Audit Committee as part of each examination.

6. Evaluation of Effectiveness of the Internal Control System

In supporting the effectiveness of internal controls in the Company, the Internal Audit Division coordinates with the Audit Committee to ensure that the functions of internal control and risk management have been applied to all aspects and lines of the Company. The Company always ensures that OJK Regulations are fulfilled as a manifestation of the Company's responsibility to always submit to and comply with applicable laws and regulations.

The Conventional and Sharia Financial Statements submitted by the Company to the Financial Services Authority and Bank Indonesia throughout 2018 are as follows: